

September 2013- Juni 2014

LAPORAN

Memperkuat Peran Dan Posisi Perempuan Untuk Mempercepat Terwujudnya Keadilan Gender, Demokrasi dan Perdamaian



**Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi**



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan

Pengantar

BAB I . SEKILAS TENTANG PROGRAM

BAB II. IMPLEMETASI PROGRAM

BAB III. KISAH SUKSES

BAB IV. ANALISA CAPAIAN DAN KEBERHASILAN

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BLM	: Bantuan Langsung untuk Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPD	: Badan Perwakilan/Permasyarakatan Desa
BRS	: Berita Resmi Statistik
BP	: Balai Perempuan (struktur Koalisi Perempuan di Desa/komunitas)
CALEG	: Calon Anggota Legislatif
CEDAW	: Convention on Elimination All forms Discrimination Against Women
DAPI	: Daerah Pemilihan (untuk Pemilu)
DKK	: Dewan Kelompok Kepentingan (Legislator Koalisi Perempuan Indonesia Tingkat Cabang)
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DUKCAPIL	: Kependudukan dan Catatan Sipil
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Konfercab	: Konferensi Cabang (Koalisi Perempuan Indonesia)
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
Pemilu	: Pemilihan Umum
Preswil	: Presidium Wilayah (Legislator Koalisi Perempuan Indonesia Propinsi)
Presnas	: Presidium Nasional (Legislator Koalisi Perempuan Indonesia Nasional/Pusat)
PUG	: Pengarus Utamaan Gender
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PPS	: Petugas Pemungutan Suara
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
Raskin	: Beras Untuk Rakyat Miskin
Rembape	: Rembug Balai Perempuan (Koalisi Perempuan Indonesia)
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
Stranas PPUG	: Strategi Nasional Percepatan Pengarus Utamaan Gender
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UKM	: Usaha Kecil Mikro

Pengantar

Program Memperkuat Peran Dan Posisi Perempuan Untuk Mempercepat Terwujudnya Keadilan Gender, Demokrasi Dan Perdamaian di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia pada periode September 2013 – Juni 2014 ini adalah program tahap ke dua dari kerja sama antara Koalisi Perempuan Indonesia dengan Oxfam yang telah dilaksanakan pada tahap pertama, periode April 2011- Juni 2013.

Program tahap kedua ini difokuskan pada penguatan kader Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Kabupaten/kota dan Desa, terutama untuk merespon agenda nasional. Agenda nasional yang sangat berkait erat dengan upaya mewujudkan keadilan gender, Demokrasi dan perdamaian di daerah, terutama adalah : Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden, Pembahasan dan Disahkannya Undang-Undang Desa, sejak Juli 2013 dan disahkan pada 18 Desember 2013, Pembahasan Kebijakan dan Design Baru Program Perlindungan social, yang akan disahkan pada awal tahun 2014, dan Diluncurkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarus Utamaan Gender (PPUG) melalui Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.

Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden, menjadi momen strategis bagi gerakan perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk meningkatkan jumlah representasi perempuan di posisi pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga legislative. Serta peluang untuk mendesak agenda pemberdayaan perempuan kepada partai politik agar diakomodir kedalam platform partai, serta menjadi visi dan misi calon anggota legislative.

Pemilu juga menjadi momen untuk memperkuat pemahaman demokrasi perempuan di tingkat akar rumput melalui pendidikan pemilih dan diskusi di tingkat desa. Melalui pendidikan pemilih dan diskusi di tingkat Desa, terutama di Balai Perempuan, kelompok perempuan dapat mengidentifikasi masalah disekitarnya, kemudian mendialogkannya dengan calon anggota legislatif.

Penguatan calon anggota legislatif diberikan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan ini diberikan untuk memperkuat politik dan membangun visi politik politik perempuan. Pelatihan juga memberikan bekal strategi pengorganisasian dan kampanye untuk memperbesar peluang calon legislatif perempuan untuk memenangkan pemilihan pemilu.

Disamping berbagai kegiatan merespon pemilu, kegiatan-kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan lainnya, seperti penguatan anggota dan organisasi serta advokasi kebijakan publik, tetap dilakukan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh staff sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia, terutama kepada sdr. Sutriyatmi (koordinator program NTT dan NTB, sekaligus Koordinator Pokja Penguatan organisasi), sdr. Emi Kartika dan Rahmat Hidayat (Keuangan), sdr. Mike Verawati Tangka (Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik), sdr. Dewi

Komalasari (Staf Pokja Reformasi Kebijakan Publik) dan Sdr Bayu Sustiwi (Divisi TI & SMI). Terima kasih juga disampaikan kepada TIM CO dan TIM Fasilitator, baik yang ada di NTT dan NTB maupun yang berasal dari luar NTT dan NTB.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota Koalisi Perempuan Indonesia di NTT dan NTB, pengurus Balai Perempuan, Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah NTB. Terima kasih kepada aparat dan pemerintah desa, Pimpinan SKPD dan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, media dan jejaring sesama masyarakat sipil di NTT dan NTB yang telah menyediakan diri untuk bekerja sama dengan baik dengan Koalisi Perempuan Indonesia.

Koalisi Perempuan Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada Oxfam, atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan program di NTT dan NTB.

Jakarta, Juni 2014

Bab I

Sekilas Tentang Program

I. Latar Belakang

Koalisi Perempuan Indonesia telah bekerja sama dengan Oxfam sejak tahun 2011, untuk pelaksanaan program di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur selama dua tahun yaitu April 2011- Juni 2013. Hingga akhir pelaksanaan program tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia telah mengalami perkembangan organisasi yang sangat pesat. memperoleh bukti hasil dan manfaat advokasi serta melihat adanya gagasan dan kegiatan inovatif yang dilakukan anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia.

Sampai dengan akhir Mei 2013, perkembangan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di Nusa Tenggara Barat adalah adanya struktur organisasi di tingkat Kabupaten/kota sebanyak 8 Cabang dan adanya struktur organisasi di tingkat desa/komunitas sebanyak 77 Balai Perempuan (BP), serta bertambahnya anggota dari 1.960 perempuan menjadi 5.500 perempuan.

Sedangkan Perkembangan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di Nusa Tenggara Timur adalah adanya struktur di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 Cabang dan struktur organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 57 BP, serta penambahan anggota dari 60 perempuan menjadi 2.010 perempuan.

Sedangkan beberapa capaian dari advokasi yang menonjol antara lain adalah didirikannya sebuah sekolah di desa terpencil di Sikka, sejumlah 220 perempuan di NTB memperoleh kekuatan hukum ikatan perkawinannya dengan dimilikinya surat Nikah, sebanyak 36 anak di NTB memperoleh akte kelahiran, adanya alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan ketiadaan dokumen legal personal dan adanya alokasi anggaran untuk bantuan permodalan koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) khusus perempuan.

Capaian perkembangan organisasi dan advokasi Koalisi Perempuan Indonesia hingga tahun 2013 ini akan menjadi pijakan Koalisi Perempuan dalam merespon situasi dan masalah, masyarakat secara umum dan perempuan pada khususnya, yang terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2015.

II. Respon Terhadap Masalah

a. Permasalahan & Isu Yang akan diintervensi

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi di Indonesia Bagian Timur yang memiliki berbagai masalah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik Hak Sipil-Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Disamping itu, kedua provinsi ini masih dihadapkan pada masalah tata kelola pemerintahan, terutama terkait dengan kinerja dibidang penyediaan layanan public dan perlindungan social, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dari jenjang Pemerintah Pusat hingga pemerintahan di Desa, serta rendahnya partisipasi warga Negara-terutama dalam proses pengambilan keputusan.

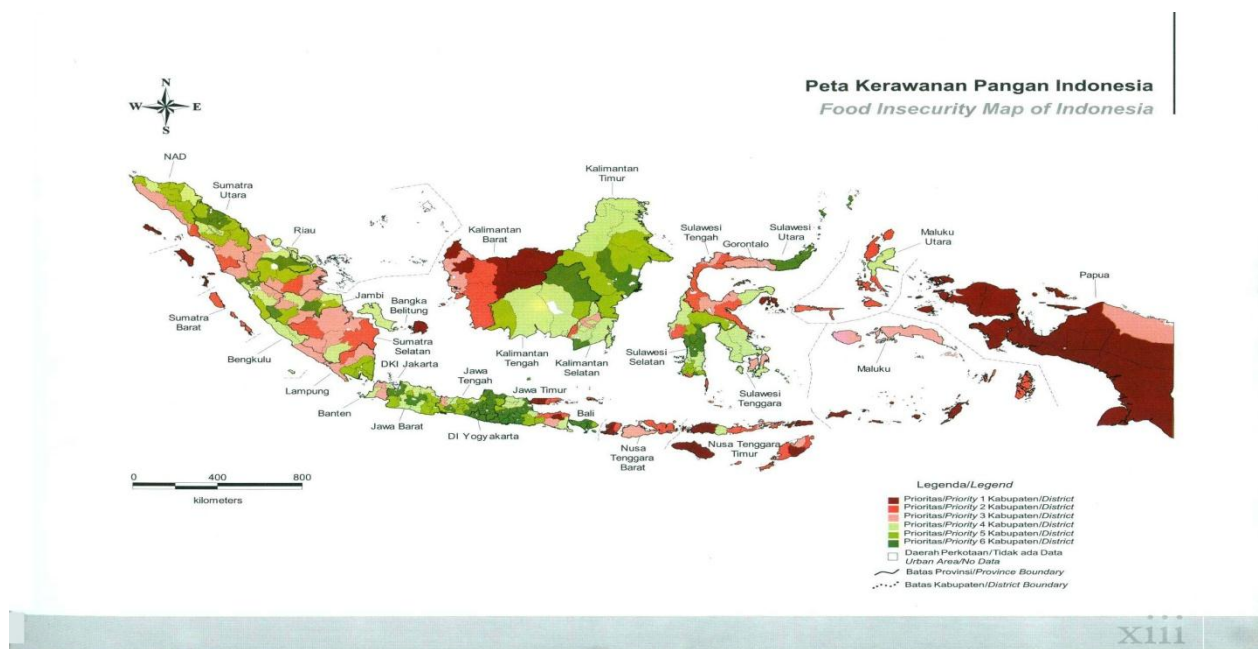
Di bidang Pemenuhan Hak Sipil Politik, persoalan yang paling mengemuka adalah rendahnya Representasi perempuan dalam lembaga Pengambilan keputusan –khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Prosentase rata-rata, perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota di kedua provinsi tersebut hanya 7%. Bila dilihat representasi

perempuan di tiap-tiap DPRD Kabupaten/kota umumnya hanya ada 4%-9% keterwakilan perempuan, bahkan beberapa diantaranya tidak ada sama sekali representasi perempuan di DPRD.

Rendahnya representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ini berakibat pada kurangnya jumlah dan kualitas kebijakan public yang berpihak kepada perempuan untuk menyelesaikan berbagai masalah ketimpangan gender, pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Jika melihat peta kemiskinan dan Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2012, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur termasuk dua provinsi dalam kategori rawan pangan dan harus menjadi prioritas pertama dan kedua dalam penanganannya. Peta kerawanan pangan ini sekaligus menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan di kedua provinsi tersebut. Untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan dan kemiskinan, pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat kebijakan dan melaksanakan program perlindungan social. Namun sayangnya, akses informasi dan pengetahuan serta keterlibatan perempuan dalam pengelolaan program perlindungan social – sangat rendah-jika tidak boleh dikatakan tidak ada. Hasil penelitian Koalisi Perempuan Indonesia di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jambi dan Bengkulu, membuktikan bahwa tidak ada kesetaraan akses-terutama akses informasi, kesempatan dalam berperan serta dan kuasa pengambilan keputusan berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan program perlindungan social.

PETA RAWAN PANGAN INDONESIA 2012



Hasil Konsultasi Publik Agenda Pembangunan Berkelanjutan - Paska 2015, yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada Januari –Februari 2013 juga menunjukkan, sebagian besar Perempuan peserta konsultasi publik baru pertama

kali mendengar adanya Program Perlindungan Sosial, seperti :Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Umumnya mereka hanya mengenal program penjualan beras murah untuk orang miskin (Raskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kenyataan ini menguatkan bukti bahwa perempuan tidak memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat program perlindungan social.

Kemiskinan dan ketimpangan Perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan serius. Berita Resmi Statistik (BRS) Kemiskinan, September 2012-BPS, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTT dan NTB sebesar masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2012 mencapai 28.59 juta (11,66%) ,sekitar 63, 1% dari jumlah penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan (BRS-kemiskinan, September 2012 –BPS). Jumlah Desa di Indonesia per 30 Juni 2012 mencapai 79.420 desa (BPS). Data ini menunjukkan realita bahwa sebagian besar penduduk miskin adalah penduduk desa. Ketimpangan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan ini tidak pernah berubah, sejak orde baru berkuasa.

STATISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2012

No	Wilayah	Penduduk Miskin per September 2012					
		Desa		Kota		Desa + Kota	
		Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
1	Nusa Tenggara Barat	412,94	15,41	415,38	21,65	828,33	18,02
2	Nusa Tenggara Timur	882,91	22,41	117,39	12,21	1 000,29	20,41
3	INDONESIA	18 086,87	14,70	10 507,77	8,60	28 594,64	11,66

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013

Paradigma pembangunan desa yang digunakan selama ini, terutama terfokus pada penanggulangan (pengurangan) kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur fisik, peningkatan pertumbuhan melalui produksi pertanian dan penyediaan layanan sosial (pendidikan dan kesehatan). Namun Kemiskinan di desa tidak pernah berkurang secara signifikan. Karena program-program tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar penyebab kemiskinan dan ketimpangan tersebut. Kemiskinan dan Ketimpangan antara Perkotaan dan Pedesaan adalah persoalan Kemiskinan Struktural. Kemiskinan ini terjadi karena relasi kuasa yang sangat timpang antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, terbatasnya kewenangan desa, ketidakjelasan pengaturan aset-aset desa yang mengakibatkan pengambilalihan penguasaan aset desa oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kemiskinan di desa juga akibat dari ketidakadilan distribusi sumber-sumber pendanaan. Untuk itu kewenangan desa dan relasi antara desa dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah, perlu diatur kembali agar lebih adil melalui penerbitan Undang-Undang Desa.

Kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diciptaan sejak di ratifikasinya Convention on Elimination All forms Discrimination Against Women

(CEDAW) atau Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Namun ketimpangan gender ini tidak kunjung teratasi. Kebijakan yang lebih operasional untuk mendukung upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diterbitkan yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Namun hasil evaluasi Implementasi PUG menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG masih belum menyeluruh di semua Kementrian/Lembaga di tingkat Pemerintah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Untuk mempercepat pencapaian target PUG sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN, maka diterbitkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Stranas PPUG melalui PPRG) yang merupakan Keputusan Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Stranas ini diluncurkan pada 15 Maret 2012 dan efektif berlaku untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013.

Dalam kurun dua tahun ini, 2013 dan 2014, setidaknya ada **empat (4) Agenda Nasional** yang akan berkait langsung dengan kehidupan perempuan di daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota hingga Desa. Empat Agenda Nasional itu ialah : **1)** Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D) dan Dewan Perwakilan Daerah, pada 9 April 2014, **2)** Pembahasan dan Disahkannya Undang-Undang Desa, sejak Juli 2013 dan disahkan pada 18 Desember 2013 , **3)** Pembahasan Kebijakan dan Design Baru Program Perlindungan social, yang akan disahkan pada awal tahun 2014, dan **4)** Diluncurkannya Stranas PPUG melalui PPRG, pada 15 Maret 2013 dan akan diuji cobakan di 33 Provinsi pada tahun 2013 dan 2014.

b. Akar Masalah & Kebutuhan Penyelesaian Masalah

Keempat Agenda Nasional ini masih menyimpan sejumlah masalah dan membutuhkan penyelesaian, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014, merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan jumlah calon anggota legislative yang terpilih dan menduduki posisi sebagai anggota DPR dan DPRD. Peluang besar ini terjadi karena adanya Peraturan KPU (PKPU) No. 7 tahun 2013 yang menyatakan bahwa Daftar Calon Anggota Legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar Bakal Calon Legislatif tersebut, **dinyatakan tidak sah**. Namun kewajiban memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislative tersebut, tidak secara otomatis akan meningkatkan keterpilihan perempuan untuk menduduki posisi sebagai anggota DPR atau DPRD. **Diperlukan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas calon anggota legislative dan Pendidikan Pemilih untuk memperbesar peluang calon anggota legislative perempuan untuk memenangkan pemilu.**

2. Pembahasan dan Disahkannya Rancangan Undang-Undang Desa (RUU DESA) pada Desember 2013. UU Desa yang tersebut masih netral gender, belum mengatur secara spesifik upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam relasi antar individu maupun relasi individu dengan sistem pemerintahan dan tata Kemasyarakatan di Desa. Saat ini tengah dilakukan advokasi untuk memasukkan beberapa pasal penting yang akan menjamin Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dengan disahkannya RUU menjadi UU Desapartisipasi sejati perempuan pedesaan dalam pelaksanaan UU Desa ini perlu didorong. Agar perempuan dapat berpartisipasi secara penuh, maka akses informasi dan pengetahuan perempuan terhadap UUDesa harus dipenuhi, agar mereka dapat melakukan advokasi di tingkat desa dan mengambil posisi-posisi strategis di desa yang telah dijamin oleh UU Desa.
3. Pembahasan Kebijakan dan Design Baru Program Perlindungan social, yang akan disahkan pada awal tahun 2014. Sampai saat ini masih sangat minim dan informasi yang membuktikan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam pengeloan Program Perlindungan Sosial, sebagai basis argumen untuk advokasi. Dibutuhkan penyebaran informasi untuk meningkatkan pengetahuan perempuan terhadap program perlindungan sosial dan Needs assessment untuk mengungkap pengalaman dan kebutuhan perempuan, pada berbagai kelompok kepentingan perempuan, terkait pelaksanaan program perlindungan sosial yang selama ini berlangsung, serta usulan perbaikan kebijakan dan design program perlindungan sosial.
4. Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Stranas PUG melalui PPRG), akan diuji cobakan di 33 Provinsi pada tahun 2013 dan 2014. Pengetahuan masyarakat sipil-khususnya organisasi perempuan terhadap Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, khususnya terkait perumusan Gender Budget Statement, masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap kebijakan ini akan berpengaruh pada partisipasi perempuan dalam proses perumusan perencanaan dan anggaran. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas untuk memperluas pengetahuan dan kecakapan perempuan tentang operasional Stranas Percepatan PUG melalui PPRD, serta praktek advokasi anggaran.

c. Kelompok Yang Akan Terkena Dampak

Terkait dengan implementasi program ini, kelompok yang terkena dampak ada 2 kategori yaitu, kelompok yang terkena dampak program secara langsung dan kelompok yang terkena dampak program secara tidak langsung.

Meningkatnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota di 10 Kabupten Nusa Tenggara Barat pada Pemilu 9 April 2014, akan secara langsung berdampak pada meningkatnya keterwakilan perempuan di masing-masing kabupaten/kota tersebut. Dengan asumsi peningkatan keterwakilan akan memberikan pembaharuan terhadap kebijakan dan anggaran yang responsif pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan, Bayi Balita dan anak-anak, usia produktif dan lanjut usia di kabupaten tersebut akan terkena dampak dari proyek atau kegiatan ini.

Dampak secara tidak langsung dari peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/Kota adalah meningkatnya keterwakilan perempuan di Lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan keterwakilan perempuan di Lembaga Perwakilan Rakyat secara nasional, sehingga meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia dan menyumbang pada pencapaian Millennium Development Goals

Pemberlakuan Undang-Undang Desa baru diharapkan akan memberikan dampak pada seluruh penduduk dan aparat Desa. Pemberlakuan UU Desa ini diharapkan secara konkrit dapat meningkatkan demokrasi dan kesejahteraan serta menurunkan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa. Pemberlakuan UU Desa baru secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin secara nasional dan memperkecil ketimpangan antara Desa dan kota.

Program Perlindungan sosial yang memberdayakan (transformatif), inklusif dan adil gender akan berdampak pada kelompok semua kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu Hamil dan menyusui, lanjut usia, pengangguran, petani, nelayan, kelompok miskin desa, buruh, pekerja informal dan kelompok miskin kota dll.

Pelaksanaan Stranas Percepatan PUG Melalui PPRG akan berdampak pada laki-laki maupun perempuan dalam segala tingkatan usia, terutama kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, berbagai bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan.

II. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

Rencana program ini disusun untuk jangka waktu lima tahun dimana program akan dilakukan dalam tahapan tahun demi tahun. Oleh karena itu tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan juga disusun dalam kerangka kerja 5 tahun.

a. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran program ini adalah :

1. Meningkatnya kemampuan calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan umum
2. Meningkatnya partisipasi perempuan untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu guna mendukung peningkatan representasi perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas perempuan anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi
4. Terciptanya hubungan Konstituensi antara Perempuan di tingkat basis (Desa/kelurahan) dengan anggota Parlemen Perempuan
5. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)1 di Kabupaten/kota yang menjadi area Program.
6. Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan mengontrol penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)1 di Kabupaten/kota yang menjadi area Program.
7. Meningkatkan pengetahuan dan akses perempuan serta kelompok rentan lainnya terhadap program perlindungan sosial

b. Indikator Keberhasilan :

Tujuan-tujuan di atas diharapkan dapat tercapai baik dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek saat aktivitas dilakukan. Pencapaian masing-masing tujuan memiliki indikator yang berbeda-beda, sebagai berikut :

Tujuan Jangka Panjang (Impact) dari program ini adalah Meningkatkan Peran dan Posisi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan untuk Mewujudkan Keadilan Gender dan Demokrasi. Indikator keberhasilan dari pencapaian tujuan jangka panjang ini ada dua :

1. Meningkatkan jumlah perempuan Dalam Lembaga Pengambilan Keputusan a.l sebagai anggota DPRD, DPD, Kepala Desa, Kepala/wakil Daerah, Ketua Kelompok Tani/Nelayan, anggota BPD, Kepala sekolah, Kepala Dinas, Ketua RT, Ketua Koperasi Perempuan, Ketua UKM, lembaga penyelenggara pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi sejati perempuan dalam pertemuan konsultasi/pengambilan keputusan Musrenbang, Forum SKPD dan rapat-rapat pengambilan keputusan.

Keberhasilan tujuan jangka panjang di atas diharapkan akan ditopang dengan pencapaian tujuan menengah (outcome) dan tujuan jangka pendek (output) yang saling menyumbang satu dengan yang lain. Artinya tidak selalu pencapaian tujuan jangka menengah A hanya didukung oleh pencapaian tujuan jangka pendek A-1 tetapi bisa jadi didukung pula oleh tujuan jangka pendek B-2.

Adapun tujuan jangka menengah – jangka pendek dan indikatornya sebagai berikut :

1. **Tujuan Jangka Menengah Tahun Pertama:** Meningkatkan peran Perempuan dalam pengambilan keputusan legislative dengan indikator meningkatnya jumlah anggota DPRD perempuan di propinsi dan kabupaten/kota NTB dan NTT.
Tujuan ini harapannya didukung oleh tujuan jangka pendek dan indikator sebagai berikut :
 - 1.1 Meningkatkan Keterampilan Politik Perempuan untuk Pemenangan Pemilu dengan indikator Caleg Perempuan mampu mengekspresikan visi politiknya.
 - 1.2 Meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk mendukung kepemimpinan perempuan dengan indikator perolehan suara caleg perempuan meningkat rata-rata 10-15 % dari sejumlah periode 2009-2014.
 - 1.3 Adanya mekanisme partisipasi konstituen dalam proses pengambilan keputusan legislative dengan indikator adanya komitmen dan kesepakatan antara caleg yang hadir dalam pendidikan pemilih, pendidikan kader organisasi dan dialog public untuk memelihara hubungan dengan konstituen, bila kelak menjadi anggota dewan.
 - 1.4 Terbentuknya inisiasi awal jaringan perempuan dan politik di tingkat kabupaten/kota di NTT dengan indikator adanya jaringan perempuan dan politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota.
2. **Tujuan jangka menengahahtahun ke-2** adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam Program Perlindungan Sosial dengan indikator perempuan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan social.

Tujuan ini diharapkan dapat didukung oleh tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- 2.1 Perempuan paham tentang hak warga Negara atas perlindungan social. Tujuan ini diharapkan akan dicapai dalam tahun ke-1 dan ke-2 dengan indikator anggota Koalisi Perempuan Indonesia memiliki pengetahuan tentang perlindungan social.
- 2.2 Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan program perlindungan social yang akan dicapai dalam tahun ke-2 dengan indikator adanya rumusan masalah tentang pelaksanaan program perlindungan social.

3. **Tujuan jangka menengah yang diharapkan akan dicapai pada tahun ke-2 dan Ke-3** adalah Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran dengan indikator Pengurus/Anggota Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan usulan alokasi anggaran untuk Pemberdayaan dan perlindungan dalam Murenbangdes dan Forum SKPD.

Tujuan ini diharapkan akan didukung dengan tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- 3.1 Perempuan memahami perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) yang akan dicapai dalam tahun ke-2 dan ke-3 dengan indikator pengurus/kader Koalisi Perempuan Indonesia mampu mengidentifikasi isu-isu strategis perempuan yang harus diatasi melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.
- 3.2 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diperjuangkan oleh jaringan perempuan untuk advokasi anggaran dalam forum SKPD pada tahun ke-2 dan ke-3 dengan indikator Koalisi Perempuan dan jaringan terlibat dalam advokasi mendorong implementasi PPRG dan adanya gender budget statement dalam RAPBD dan APBD.
- 3.3 Adanya usulan dan alokasi anggaran dalam *GenderBudget statement*(GBS) dari kelompok perempuan dengan indikator adanya rumusan masalah dan usulan program untuk mengatasi isu-isu penting melalui kebijakan dan anggaran PPRG.
4. **Tujuan jangka menengah ke-4** adalah Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembaharuan desa yang diharapkan akan dicapai dalam tahun ke-2 dan ke-3 dengan indikator Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembaharuan Desa dan Perempuan mengintervensi rapat-rapat pembahasan reformasi desa.

Tujuan ini harapannya didukung dengan pencapaian tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- 4.1 Perempuan mampu membahas dan bernegosiasi dengan Pemimpin Desa terkait implementasi UU Desa dengan indikator pencapaian Perempuan memahami UU Desa baru dan mampu bernegosiasi dengan Pemerintah desa
- 4.2 Perempuan Terlibat dalam Rapat-rapat pengambilan keputusan dalam Persiapan implementasi UU Desa
5. **Tujuan jangka menengah ke-5** : Menguatnya pengaruh Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dalam gerakan masyarakat sipil dengan indikator Pengurus dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia mampu membangun organisasi menjadi organisasi perempuan yang kredibel dan aktif dalam jejaring masyarakat sipil.

Tujuan ini diharapkan akan didukung dengan pencapaian tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- 5.1 Terlaksananya mekanisme akuntabilitas organisasi dengan indicator adanya laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada anggota.
- 5.2 Bertambahnya jumlah anggota Koalisi Perempuan Indonesia dengan indicator adanya data penambahan jumlah anggota.
- 5.3 Bertambahnya jumlah balai perempuan dengan indicator adanya data penambahan jumlah balai perempuan.
- 5.4 System dan mekanisme control organisasi berjalan efektif dengan indicator adanya perangkat monev yang bakku dan diberlakuna secara berkala.
- 5.5 Terciptanya sinergi antara Koalisi Perempuan Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dengan indicator adanya kerjasama antara Koalisi Perempuan Indonesia dengan masyarakat sipil lain baik yang merupakan mitra Oxfam maupun diluar mitra Oxfam.

IV. Bentuk Kegiatan dan Area

Bentuk kegiatan dan area pelaksanaan untuk mencapai tujuan di atas sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk caleg perempuan dilakukan di tingkat propinsi NTB dan NTT
2. Dialog public antara caleg perempuan dan calon pemilih serta stakeholder dilakukan di tingkat propinsi NTB dan NTT
3. Membangun jejaring caleg perempuan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan propinsi NTT
4. Konferensi cabang dilakukan di tingkat kabupaten/kota di NTT dan NTB
5. Pertemuan balai-balai perempuan dilakukan di tingkat desa/kelurahan/komunitas di NTB dan NTT
6. Pengorganisasian anggota dan calon anggota dilakukan di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota di NTB dan NTT
7. Kampanye perempuan dan pemilu melalui media massa nasional dilakukan di tingkat nasional (secretariat nasional)
8. Pencetakan dan distribusi bahan bacaan dan informasi terkait isu-isu dilakukan di tingkat secretariat nasional untuk didistribusikan kepada anggota di NTB dan NTT
9. Pertanggungjawaban dan pengelolaan kelembagaan dilakukan di semua struktur kepengurusan mulai dari balai perempuan, cabang, wilayah dan nasional

V. Pelaksana Program

Pelaksanaan program kerjasama ini dikoordinasikan oleh pengurus nasional Koalisi Perempuan Indonesia dengan struktur sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia – Dian Kartikasari
Koordinator Program	: Koordinator Pokja Penguatan Organisasi – Sutriyatmi
Staff Penguatan Organisasi:	Staff Sistem Manajemen Informasi Setnas – Bayu Sustiw
Staff Advokasi	: Staff Pokja Reformasi Kebijakan Publik – Dewi Komalasari
Staff Keuangan	: Staff Bagian Pembukuan – Rahmat Hidayat menggantikan Ririn Ridiarti

Pengelolaan di tingkat wilayah dan cabang :

Pengelolaan di tingkat wilayah NTB dilakukan oleh Pengurus Wilayah NTB yaitu Sekretaris Wilayah (Sri Sustini) dan Koordinator Presidium Wilayah (Selly Sembiring).

Pengelola di tingkat cabang-cabang di NTT dilakukan oleh sekretaris cabang dengan monitoring dewan kelompok kepentingan masing-masing, yaitu :

1. Cabang Ngada : Sekretaris Cabang (Cornelia Ene)
2. Cabang Sikka : Sekretaris Cabang (Ursula Maria)
3. Cabang Flores Timur : Sekretaris Cabang (Benedicta B. Hera)
4. Cabang Sumba Tengah : Sekretaris Cabang (Oki Rambu Padu)
5. Cabang Sumba Barat Daya : Sekretaris Cabang (Wilhelmina M. Dappa)
6. Cabang Sumba Timur : Sekretaris Cabang (Yunita Wangguwali)
7. Cabang Kota Kupang : Sekretaris Cabang (Serlinia Rambu Anawoli)

Bab II

Implementasi Program

1. Sekilas Koalisi Perempuan Indonesia di NTB dan NTT

Sebagaimana telah disampaikan dalam awal kerjasama Koalisi Perempuan Indonesia dengan Oxfam Australia bahwa dalam sejarah pembentukan struktur dan pengorganisasian anggota, Koalisi Perempuan Indonesia mengalami perubahan pendekatan. Tahap awal dalam kongres nasional I Desember 1998 diputuskan untuk membangun struktur kepengurusan di tingkat nasional (pengurus nasional) dan di tingkat provinsi (pengurus wilayah) dimana kemudian pengurus wilayah bertugas untuk membangun struktur tingkat kabupaten/kota (pengurus cabang). Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang terbentuk dengan pendekatan ini sehingga tahun 2000 dilakukan kongres wilayah I NTB untuk memilih sekretaris wilayah dan presidium wilayah.

Dalam perjalanan organisasi ada perubahan pendekatan yaitu struktur dibentuk melalui proses pengorganisasian anggota sehingga organisasi akan bertumbuh dari *bawah* – dalam arti ada dulu perempuan terdidik dan kritis yang menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia kemudian baru membangun organisasi dari tingkat balai perempuan, cabang, wilayah dan nasional. **Hasil dari perubahan tersebut saat ini Koalisi Perempuan Indonesia wilayah NTB telah memiliki anggota sejumlah 6.830 perempuan tersebar di 84 balai perempuan, 9 cabang dan 1 kabupaten yang belum terbentuk kepengurusan cabang (Lombok Timur).** Mereka berada di 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa sebagaimana terlihat dalam peta di bawah ini :



Sementara itu NTT merupakan provinsi dimana ada sejumlah anggota yang menghadiri kongres nasional I di Yogyakarta, namun kerja pengorganisasian yang intensif baru dilakukan pada tahun 2008 di kabupaten Sikka. **Setelah ada kerjasama dengan Oxfam Australia kemudian meluas ke 9 kabupaten tahun sejak pertengahan 2011.** Saat ini Koalisi Perempuan Indonesia di NTT tersebar di 10

kabupaten/kota dengan jumlah balai perempuan yang telah terbentuk sebanyak 100 balai perempuan namun 6 diantaranya belum terlalu aktif (2 BP di SBD, 3 BP di Sumba Barat dan 1 BP di TTS). Ketidakaktifan balai perempuan ini terutama dilatarbelakangi oleh kurang mendalamnya pemahaman anggota pada gerakan Koalisi Perempuan Indonesia sehingga mereka pasif dan melakukan kegiatan hanya menunggu pengurus cabang atau staff setnas yang hadir atau mengajak melakukan kegiatan. Kondisi ini sedang dalam proses untuk pengorganisasian ulang oleh kader-kader organisasi terdekat, agar anggota yang sudah ada lebih paham dan mampu menggerakkan organisasi untuk mencapai visi misi.

Struktur organisasi tingkat cabang di NTT saat ini telah ada 7 cabang yaitu Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Kota Kupang yang tersebar di 3 pulau besar Flores, Sumba dan Timor Barat. Dalam satu tahun ke depan dalam cita-cita bersama adalah membangun cabang kabupaten Kupang dan kabupaten Sumba Barat dengan catatan penguatan anggota dan balai-balai perempuan dapat dilakukan. Sebaran struktur cabang di NTT terlihat dalam peta dibawah ini :



Kerja-kerja Koalisi Perempuan Indonesia di NTB dan NTT dengan dukungan program bersama Oxfam dalam periode kerjasama september 2013 – juni 2014 cukup mendukung gerak organisasi terutama dalam menghadapi pemilu legislatif 2014. Momentum tersebut penting untuk mewujudkan isu penting yang diperjuangkan yaitu keterwakilan politik perempuan dan dalam kerangka mewujudkan keadilan gender, demokrasi dan perdamaian.

Selain dukungan dari Oxfam tentu yang utama adalah bagaimana anggota dan pengurus mampu mengelola potensi dan peluang yang dimiliki agar cita-citanya dapat terwujud. Pada akhir program kerjasama periode ini Koalisi Perempuan Indonesia di NTB dan NTT kembali menginventarisir potensi dan peluang organisasi

agar dapat dioptimalkan untuk gerak tahun-tahun yang akan datang. Harapan kami Koalisi Perempuan Indonesia dapat semakin maju, bukan hanya kemajuan anggota dan organisasi tetapi yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat yang lebih luas.

2. Kegiatan

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagai strategi yang dipilih oleh Koalisi Perempuan Indonesia melahirkan sejumlah agenda kerja organisasi yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan program tertentu. Karena kerja pengorganisasian masyarakat sejatinya adalah kerja membangun kesadaran kritis hingga individu-individu menyadari pentingnya **bergerak bersama** untuk merubah situasi menjadi lebih baik. Dari situasi ketidakadilan menjadi situasi yang lebih adil untuk semua, dari situasi penuh penindasan menjadi situasi yang setara, saling menghormati dan menghargai, dari situasi yang penuh rasa curiga dan konflik menjadi situasi yang lebih damai, saling percaya, nyaman dan aman untuk semua.

Pengorganisasian bukan hanya kerja yang dapat dilakukan dalam waktu satu-tiga bulan, dalam jam kerja 9-17 dan sejenisnya. Semua ruang dapat digunakan oleh seorang organizer untuk melakukan proses kerja dan mencapai mimpi. Dalam pada itu seorang organizer dituntut menjadi orang yang kreatif, inovatif dan berpikir di luar kotak umum. Kondisi bencana alam dalam pandangan seorang organizer harusnya tidak dilihat semata-mata sebuah bencana yang harus ditangisi melainkan peluang untuk membangun ikatan antara penyintas, penolong dan elemen lain untuk bangkit, memperbaiki keadaan dan merancang system untukantisipasi di masa depan. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, industry dst bukanlah semata-mata barang-barang tidak berguna yang harus dimusnahkan tetapi menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan masa depan.

Pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lain penting dilakukan sebagai bagian dalam proses pengorganisasian. Pelatihan ini bukan hanya bagi masyarakat yang diorganisir tetapi juga bagi organizer itu sendiri. Penyokong dari peningkatan kapasitas selain pelatihan-pelatihan adalah bahan bacaan, informasi dan diskusi dengan berbagai pihak untuk memperkaya diri, melatih analisis, ketrampilan mengemukakan pendapat, membangun kepercayaan diri sekaligus menguji apakah yang dilakukan dapat dimengerti dan diterima orang lain atau tidak, apakah memerlukan perbaikan-revisi, inovasi baru dst.

Kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia dengan support yang diberikan oleh Oxfam terus berlangsung di propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Capaian-capaian dalam periode kerjasama September 2013 – Juni 2014 sesungguhnya tidak dapat disejajarkan dengan besaran dana yang dikucurkan, karena dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja. Namun kerjasama

dengan Oxfam yang secara intensif sudah dimulai sejak tahun 2011 memang tidak dapat hanya dihitung dengan besarnya dana/uang yang diterima-kelolakan kepada Koalisi Perempuan Indonesia.

Berikut kegiatan dan capaian dalam kerangka pengorganisasian :

1. Pertemuan Rutin Balai Perempuan

Pertemuan rutin di balai perempuan Koalisi Perempuan Indonesia idealnya terjadi sebagai forum anggota untuk membahas persoalan-persoalan yang muncul baik dalam organisasi maupun di masyarakat secara umum. Dengan demikian organisasi dapat menentukan sikap dan langkah untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan masyarakat. Selain itu pertemuan rutin ini juga merupakan ruang bagi anggota untuk berbagi informasi, memperkaya diri dengan berbagai wawasan dan ketrampilan hidup yang bermanfaat.

Pertemuan rutin balai perempuan secara programatik periode ini, support Oxfam hanya diberikan pada balai perempuan di NTT dengan target 9 kali pertemuan. Dalam konsolidasi sebelum pelaksanaan program periode ini di NTT disepakati support tersebut dapat digunakan oleh balai-balai perempuan dan atau calon balai perempuan yang belum ada kepengurusan cabang di kabupaten/kota masing-masing. Kesepakatan ini dibangun atas dasar logika kabupaten/kota yang sudah terbentuk kepengurusan cabang maka kerja-kerja organisasi sudah lebih tertata dan terkoordinir termasuk didalamnya kerja fundraising. Alasan lain juga dalam periode program kali ini ada dana support kelembagaan bagi mereka yang sudah ada pengurus cabang di NTT. Diharapkan support tersebut juga dapat dikelola untuk keperluan pertemuan bersama balai-balai perempuan dalam cabangnya.

Penggunaan support dana dari Oxfam selain untuk mencapai tujuan di atas juga digunakan untuk support beberapa rembug balai perempuan khususnya mereka yang melakukan rembug balai perempuan untuk pertama kalinya. Rembug balai perempuan merupakan mekanisme pengambilan keputusan organisasi di tingkat balai perempuan dengan tujuan untuk merumuskan garis besar haluan organisasi dan program kerja berdasarkan temuan-temuan persoalan dan usulan anggota untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui organisasi, memilih dan menetapkan pengurus balai perempuan (sekretaris dan dewan BP) dan jika rembug balai perempuan dilakukan untuk kedua kali dst maka dalam forum ini juga disampaikan pertanggungjawaban pengurus balai perempuan.

Capaian program dalam periode ini untuk pertemuan balai perempuan sebagai berikut :

1.a. Pertemuan Balai Perempuan di Nusa Tenggara Timur

➤ **a.1.. Pertemuan (calon) balai perempuan desa Retraen kecamatan Amarasi kabupaten Kupang - NTT.**

Desa ini diorganisir oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari balai perempuan Buraen yang berada satu kecamatan dengan Retraen. Dari pertemuan-pertemuan informal dan dua kali pertemuan formal maka dicapai :



1. Bertambahnya anggot Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Terbentuknya struktur Balai Perempuan, melalui Rembug Balai Perempuan ke-1
3. Adanya program Kerja Balai Perempuan untuk Periode 2014-2017.
4. Adanya kepengurusan Balai Perempuan periode 2014-2017.
5. Adanya kesepakatan untuk memperkuat perencanaan produksi Tenun yaitu
 - a. kelompok tenun perempuan yang sudah berjalan akan focus pada membuat tenun dengan motif asli Amarasi,
 - b. Tenun akan menggunakan pewarna alami.
 - c. Mengundang Pelatih Tenun dari desa Teyun Baun kecamatan Amarasi Barat.

Hingga saat ini rencana tersebut memang belum terealisasi karena kesibukan masing-masing pada kerja pertanian dan kebun.

➤ **a.2.. Pertemuan untuk sosialisasi tentang Koalisi Perempuan Indonesia hingga terlaksana rembug balai perempuan juga terjadi di Sumba Timur – NTT**

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabanjawa, Kalunga Daharung dan Praihinggi. Selain dilakukan oleh kader yang berasal dari balai perempuan Matawai yang sudah terbentuk lebih dahulu, kerja-kerja ini juga dilakukan oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia setempat. Di masing-masing desa/kelurahan di atas terdapat satu orang anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang juga saat pemilu legislative menjadi caleg dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

➤ **a.3. Pertemuan lintas balai perempuan dan calon balai perempuan di kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat NTT**

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2013, diikuti oleh sekitar 150 orang yang berasal dari balai perempuan Tema Tana, desa Doka Kaka, desa Manola, desa Tana Rara, desa Baliledo . Pertemuan yang berpusat di desa Manola ini sebenarnya dirancang hanya akan dihadiri oleh sekitar 5 orang dari tiap-tiap desa agar dapat focus berdiskusi penyegaran tentang Koalisi Perempuan Indonesia dan merencanakan kegiatan dalam kerangka pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia. Namun ketika panitia berkunjung dari desa ke desa untuk mengabarkan hal tersebut, banyak anggota antusias dan menyatakan ingin mengikuti pertemuan sehingga akhirnya pertemuan diikuti oleh sangat banyak anggota dan calon anggota. Pertemuan menjadi forum sosialisasi Koalisi Perempuan Indonesia ; memperkenalkan visi, misi, program kerja, strategi yang dipilih dan titik tekan yang penting bahwa Koalisi Perempuan Indonesia ini bukan organisasi proyek yang datang ke kampung-kampung membawa uang dan atau membagi barang-barang. Selain sosialisasi tentang Koalisi Perempuan Indonesia, pertemuan ini juga menjaring informasi dari para peserta.

Temuan dalam pertemuan ini antara lain adalah :

- Desa Manola dikepalai oleh **seorang perempuan** yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa di desa tersebut, Kepemimpinan Perempuan, telah diterima.
- Suami dari ibu kepala desa (yang juga hadir dalam pertemuan) menyatakan dukungannya pada kerja-kerja sang istri dengan syarat istrinya bekerja untuk masyarakat banyak, bukan untuk golongan-golongan tertentu dan tidak hanya menuruti perintah atasan jika perintah tersebut merugikan banyak orang. Informasi ini menjadi pelajaran bagi peserta, bahwa dukungan suami terhadap istrinya, untuk mencapai posisi strategis dalam kepemimpinan, sangat mempengaruhi keberhasilan perjuangan perempuan.
- Adanya Korupsi bibit Kelapa. Informasi ini disampaikan oleh suami kepala desa. Menurut keterangannya: ibu kepala desa dipanggil oleh ibu camat untuk mendapatkan “pengarahan” terkait dengan kasus korupsi bantuan bibit kelapa yang dilakukan oleh dinas pertanian dan semua kepala desa di kabupaten Sumba Barat diminta menjadi saksi. Padahal menurut suami ibu desa, mereka yang di desa tidak tahu-menahu jumlah bibit yang seharusnya diterima dan sudah pernah dipanggil kejaksaan negeri untuk diperiksa sebagai saksi.

- Tingginya angka buta aksara pada perempuan di kecamatan Loli.
- Persoalan ekonomi yang mendasar adalah minimnya akses masyarakat pada pasar baik untuk mendapatkan bahan, bibit maupun untuk menjual hasil-hasil pertanian dan peternakan. Sebagai daerah pertanian kecamatan Loli termasuk daerah yang subur dengan penghasilan padi, ubi, jagung, ketela.
- Berbagai pelatihan ketrampilan (*life skill*) sudah diterima rata-rata dari peserta yang hadir dari program-program pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang bekerja di kecamatan Loli. Namun pelatihan-pelatihan tersebut memang belum diaplikasikan untuk sehari-hari karena berbagai factor. Misalnya yang paling banyak adalah pelatihan terkait dengan kelompok tenun namun akses untuk membeli benang tidak mudah karena benang harus dibeli ke kota, transportasi umum dari desa ke kota Waikabubak juga tidak banyak.

Disamping menggali permasalahan, pertemuan ini juga menggali usulan peserta untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta. Usulan dari peserta paling banyak adalah:

- pelatihan yang terkait dengan pertanian, seperti pembuatan pupuk dan pestisida organik. Usulan ini didasarkan pada kebutuhan akan pupuk dan pestisida yang selama ini menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang lagi-lagi harganya mahal dan harus dibeli di kota.
- Pelatihan ketrampilan bagi peserta
- diselenggarakannya pendidikan kader dasar (PKD) di tiap-tiap desa agar semua lebih memahami Koalisi Perempuan Indonesia. Sementara dari 5 desa yang hadir baru desa Tema



Tana yang sudah menyelenggarakan PKD dan sudah melakukan rembug balai perempuan yang pertama.

Pertemuan lintas desa di kecamatan Loli – Sumba Barat – NTT yang kedua dilakukan di desa Baliledo pada bulan Maret 2014. Agenda pertemuan merancang kegiatan yang akan dilakukan bersama dan di masing-masing desa. Pertemuan ini menyepakati dilakukan pelatihan

pembuatan pupuk organik di desa Baliledo yang dilakukan setelah

proses pemilu legislative bulan april 2014. Pelatihan akan difasilitasi oleh kader Koalisi Perempuan Indonesia dari Sumba Tengah yang sudah mendapatkan pelatihan dari geng motor imut Kupang.

➤ **a.4. Pertemuan di balai perempuan Weekokora – cabang Sumba Barat Daya- NTT**

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan:

- Menghidupkan kembali koperasi yang sudah pernah ada, dimana koperasi yang sudah terbentuk merupakan koperasi kelompok tani setempat namun sebagian besar anggotanya kemudian menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
- Rencana kerjasama dengan Yayasan Sosial Donders (YSD) untuk melakukan ujicoba biogas dengan memanfaatkan kotoran babi yang rata-rata dimiliki oleh warga setempat. Uji coba akan dilakukan pertama kali di rumah sekcab dengan menggunakan ternak dan kandang babi milik pribadi dan akan bekerjasama dengan YSD.
- Membuka fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kesepakatan ini diambil melihat banyaknya anak-anak usia dini di desa Weekokora yang jauh dari akses layanan pendidikan. Balai perempuan Weekokora memulai PAUD dengan memanfaatkan ruang kosong di rumah sekcab Sumba Barat Daya (SBD), menyiapkan 3 orang anggota untuk menjadi pengajar dengan mempelajari modul PAUD yang didapat dari Yayasan Sosial Donders (YSD) SBD. Fasilitas PAUD hanya berupa ruangan dengan terpal untuk duduk anak-anak, papan tulis dan spidol. Saat baru pertama dibuka pada bulan Maret 2014 anak-anak yang datang berjumlah sekitar 60 anak dan pada pertemuan kedua bertambah menjadi 84 anak. Dengan besarnya minat anak dan orangtua ini kemudian disepakati untuk membagi anak dalam 2 kelompok usia dan masing-masing melakukan pertemuan kelas 2 kali setiap minggu.

Pengalaman baik balai perempuan Weekokora ini menginspirasi balai perempuan Welimbu dan balai perempuan Pogotena untuk mempersiapkan diri membuka PAUD yang dikelola oleh Koalisi Perempuan Indonesia.



Pertemuan di balai perempuan Welimbu - cabang SBD- NTT juga menemukan banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan – anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh pasangan, orangtua maupun saudara laki-lakinya. Pertemuan di Weelimbu

menghasilkan kesepakatan yang dijalankan yaitu membangun koperasi balai perempuan, pelatihan membuat pupuk organik berbahan hewani setempat difasilitasi oleh YSD.

Di SBD juga terjadi pertemuan rutin di balai perempuan lain seperti BP Mareda Kalada yang mulai membicarakan bagaimana membentuk **koperasi** balai perempuan agar mereka memiliki wadah yang dapat memberikan bantuan keuangan bagi perempuan dan memberikan keuntungan untuk mereka sendiri.

Selain itu terjadi juga pertemuan kelompok kepentingan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa untuk melakukan pemetaan potensi anak muda di SBD yang dapat dikembangkan. Kelompok ini menyadari bahwa Sumba merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, namun belum dikembangkan secara optimal. Mereka sebagai anak muda Sumba tidak mau hanya menjadi penonton ketika roda pembangunan terus berjalan dan berbagai investasi asing/dari luar Sumba juga terus berdatangan.

➤ **a.5. Pertemuan-pertemuan di balai perempuan cabang Sumba Tengah – NTT dalam periode program September 2013 – Juni 2014**

Pertemuan ini digunakan sebagai forum sosialisasi pentingnya keterwakilan politik perempuan, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana balai perempuan bergerak sebagai Koalisi Perempuan Indonesia dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki masing-masing balai perempuan.

Selain itu ada pelatihan membuat pupuk dan pestisida organik yang difasilitasi oleh pengurus cabang Sumba Tengah yang sebelumnya telah dilatih oleh geng motor imut kupang.

Pelatihan pembuatan pupuk organik ini juga dilakukan di desa-desa yang belum terbangun organisasi Koalisi Perempuan Indonesia atas permintaan para kepala desa yang bersangkutan atau masyarakat setempat yang mendengar mengenai pelatihan Koalisi Perempuan

Indonesia di Sumba Tengah. Pelatihan Pupuk organik dilakukan di 15 desa yaitu di 5 desa yang telah ada Balai Perempuan dan di 10 desa yang belum ada Balai Perempuan yang berdekatan dengan desa yang telah ada Balai Perempuan.

Hasil dari pelatihan ini adalah : 15 Desa telah mempraktekkan Pertanian organik. Satu diantara 15 desa tersebut telah terbebas dari masalah kerawanan pangan..

➤ **a.6. Pertemuan balai-balai perempuan di cabang Sikka – NTT**

Pertemuan ini antara lain menghasilkan kesepakatan rembug balai perempuan dengan pendanaan mandiri di beberapa balai perempuan baru. Kemandirian dalam hal pendanaan ini memang ditanamkan di cabang Sikka sejak lama karena mereka sudah mulai bergerak intensif sejak tahun 2008 dimana saat itu belum ada support dana program baik dari sekretariat nasional, pemda dan atau lembaga lain. Mereka bekerja atas dasar kesukarelawanan dan semangat untuk membangun kemajuan perempuan di kabupaten Sikka. Isu yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan balai perempuan di Sikka masih melanjutkan apa yang telah digunakan sebelumnya yaitu membangun koperasi tingkat balai perempuan, daur ulang sampah organik dan an-organik, menggali dan mengembangkan kearifan lokal untuk kehidupan sehari-hari (seperti pengolahan pangan lokal, pembuatan minyak kelapa), sosialisasi aturan dan penanganan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak.

➤ **a.7. Pertemuan rutin balai-balai perempuan di cabang Ngada – NTT**

Pertemuan ini diisi dengan kegiatan rutin seperti arisan, persiapan hari besar keagamaan yang dilakukan bersama di balai-balai perempuan (natal dan paskah), kegiatan membersihkan lingkungan bersama masyarakat yang dimotori oleh anggota dan pengurus balai perempuan, peringatan hari Kartini secara sederhana yang dilakukan di balai perempuan, diskusi persoalan kerusakan alam yang terus terjadi di berbagai tempat dan dampaknya bagi perempuan.

➤ **a.8. Pertemuan di balai perempuan cabang Kota Kupang**



Pertemuan-pertemuan ini dilakukan dengan porsi yang lebih banyak membahas topic per-KPI-an. Hal ini dilakukan untuk terus-menerus membuat anggota memahami apa yang dapat dilakukan bersama dalam organisasi, meneguhkan kembalim tujuan bergabung dalam organisasi dan memulai langkah-langkah memantapkan gerak Koalisi

Perempuan Indonesia di kota Kupang. Pertemuan menjelang konferensi cabang I pada Juni 2014 di balai perempuan Oebobo juga diisi dengan pendidikan kader dasar (PKD) kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ketrampilan memanfaatkan limbah kain perca untuk dijadikan berbagai macam aksesoris. Kedua pelatihan tersebut difasilitasi oleh Nafidatul Himma – kader Koalisi Perempuan Indonesia dari Bojonegoro Jawa Timur - yang sengaja diminta oleh secretariat nasional untuk membantu dan berbagi pengalaman dengan anggota di kota Kupang. Selain itu paska konferensi cabang I juga dilakukan pelatihan pembukuan keuangan yang diikuti oleh pengurus balai-balai perempuan dan pengurus cabang terpilih. Pelatihan ini difasilitasi oleh Yuseva Sinuraya staff keuangan dari secretariat nasional. Pelatihan pembukuan ini bertujuan agar pengurus dan anggota memahami bagaimana melakukan pembukuan keuangan secara sederhana sehingga organisasi akan lebih tertib secara administrasi dan mewujudkan akuntabilitas organisasi.

1.b. Pertemuan balai-balai perempuan di wilayah Nusa Tenggara Barat

➤ **b.1. Pertemuan balai-balai perempuan di Sumbawa**

Pertemuan di Sumbawa tetap berjalan dengan program-program yang telah disusun. Salah satu alat pertemuannya adalah arisan bulanan dan pengajian yasinan. Alat pertemuan ini juga digunakan hampir diseluruh cabang di NTB.

Capaian dalam periode ini di cabang Sumbawa adalah: terbangunnya **kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa** untuk pelatihan ketrampilan, pemberian bantuan modal dan penyuluhan tentang bagaimana membangun koperasi. **Dinas Koperasi juga membantu proses perijinan koperasi**



balai perempuan. Pertemuan dengan dinas-dinas ini dilakukan dari balai ke balai, tidak seperti biasanya dimana masyarakat yang diminta hadir *menghadap* kepada para pejabat.

Cabang Sumbawa juga mendapatkan **sumbangan buku bacaan** dari Dinas Arsip dan Perpustakaan propinsi NTB yang diserahkan langsung ketika mereka berkunjung ke Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sumbawa di kantor sekretariat cabang. Selain **itu advokasi kasus-kasus buruh migran, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus KDRT.** Kader-kader dan Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di Cabang Sumbawa, menjadi narasumber dan fasilitator pelatihan organisasi lain.

➤ **b.2. Pertemuan Balai Perempuan di Cabang kabupaten Bima .**

Pengurus dan Kader Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Bima sedang gencar juga melakukan sosialisasi Koalisi Perempuan Indonesia di balai-balai perempuan sebagai salah satu upaya membuat anggota kembali memahami dan mendalami perKPIan. Harapannya dengan pertemuan ini akan membuat anggota dan pengurus balai perempuan semakin sadar apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan organisasi mereka.

Balai-balai perempuan di cabang kabupaten Bima juga aktif melakukan diskusi mengenai: **keterbukaan informasi publik dan mengkritisi layanan publik bagi masyarakat** oleh pemda setempat. Dalam konteks pemilu legislatif, selain anggota aktif menjadi **Relawan Demokrasi** di KPUD, pengurus cabang kabupaten Bima mendapat undangan untuk menjadi narasumber di radio Citra FM dan Bima TV untuk berbicara tentang “Pemilu Damai Berkualitas dan Berintegritas”.

Sebagai daerah yang masuk dalam jajaran pulau luar, cabang kabupaten Bima sebagaimana cabang Dompu terlibat dalam pemetaan yang dilakukan SUKMA untuk memetakan kondisi demografi dan geografi kabupaten Bima. Selain itu juga

bekerjasama dengan dinas pertanian melakukan gerakan penanaman 1000 pohon yang dilakukan anggota di balai-balai perempuan.

➤ **b.3. Pertemuan di Balai Pertemuan Cabang Lombok Barat**

Di Cabang Lombok Barat tidak semua balai perempuan melakukan pertemuan rutin. Namun secara keseluruhan cabang ini terus bergerak dengan berbagai isu dan alat yang digunakan. Selain *itsbath* nikah, mereka mendapat pengaduan kasus buruh migran sejak periode lalu dimana capaian dalam periode ini adalah pelaku yang menjadi calon buruh migran korban kekerasan majikan di Malaysia telah divonis bersalah oleh hakim. Sekarang pelaku sedang melakukan upaya banding.



Selain itu balai-balai perempuan di Lombok Barat bersama pengurus cabang sedang **mengembangkan desa wisata yang dikelola oleh koperasi wisata yang mereka bentuk bersama-sama**. Pengembangan desa wisata ini sekaligus menjadi alat pengorganisasian ke desa baru yaitu desa Gubug Baru yang masih satu kawasan dengan balai perempuan Lelede dan Banyumulek.

➤ **b.4. Pertemuan Balai-Perempuan di Cabang Dompu.**

Cabang Dompu menggunakan penguatan ekonomi anggota dan kelompok dalam melakukan kerja pengorganisasian. Selain itu mereka juga **terlibat aktif dalam advokasi pulau-pulau kecil terpencil dengan menjadi tim SUKMA** untuk melakukan pemetaan geografis dan demografi. Mereka juga **terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana letusan Gunung Sangiang pada Mei 2014**. Fokus utama penyaluran bantuan dan penanganan korban bukan hanya pada perempuan dan anak tetapi juga lansia. Hal ini karena banyaknya lansia yang menjadi korban dan kurang banyak perhatian dari pihak lain. Cabang Dompu membantu dengan membagikan masker dan air mineral. Selain itu mereka kemudian bekerja bersama badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten Dompu untuk penanganan lanjutan seperti identifikasi korban yang sakit.

Dalam penguatan ekonomi kelompok cabang Dompu juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan ketrampilan bukan hanya di balai perempuan namun juga diundang oleh lembaga lain seperti

LESPEL. Cabang Dompu juga membuat kedai kopi sebagai salah satu alat penggalangan dana bagi organisasi.

➤ **b.5. Pertemuan Balai Perempuan di Cabang Kota Bima**

Cabang kota Bima periode ini dalam proses melakukan konsolidasi balai-balai perempuan untuk persiapan konferensi cabang II setelah habisnya masa kerja pengurus cabang. Konsolidasi ini sekaligus menjadi ruang untuk sosialisasi perda kota Bima tentang Kesehatan Ibu dan Anak bekerjasama dengan biro pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Bima. Pengurus cabang kota Bima juga terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan bersama bappeda, khususnya masukan tentang pengarusutamaan gender dalam rencana tersebut.

Dalam konteks internal juga dilakukan proses update data anggota kota Bima agar lebih jelas dan valid dengan pemisahan anggota yang sekarang menjadi anggota balai perempuan di cabang kabupaten Bima. Selain itu juga balai-balai perempuan yang ada mengorganisir anggota baru hingga terbentuk 3 BP baru yaitu BP Kendo, BP Nungga dan BP Ntobo.

➤ **B.6. Balai-balai perempuan di cabang Lombok Utara (KLU)**

Cabang Lombok Utara aktif melakukan pendataan dan mendorong sidang istbath nikah sampai dengan anggota mendapatkan surat nikah yang sah. Jika nanti orangtua sudah mendapatkan surat nikah ini maka anak-anaknya akan segera diproses agar memiliki akte kelahiran. Proses ini beriringan dengan sosialisasi tentang layanan publik dan hak warga negara atas layanan publik

2. Konferensi Cabang

Konferensi Cabang merupakan forum pengambilan tertinggi dalam Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat kabupaten/kota. Forum ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan jika untuk pertama kali dilakukan maka syarat administrasi yang harus terpenuhi adalah dalam kabupaten/kota tersebut sudah terbentuk minimal 3 balai perempuan, sudah terbentuk minimal 3 kelompok kepentingan dari seluruh anggota yang jumlah totalnya minimal 100 orang. Syarat tersebut disusun dengan memperhatikan pendekatan pengorganisasian yang digunakan sebagai strategi membangun Koalisi Perempuan Indonesia.



Rencana secara program yang disupport Oxfam dalam periode ini, konferensi cabang **targetnya akan dilakukan 2 kali di NTT**. Namun dalam kesepakatan pengurus lintas cabang dan balai perempuan di NTT di awal program, alokasi budget untuk konferensi cabang dapat digunakan maksimal untuk 4 konferensi cabang dan rapat kerja cabang. Kesepakatan penting lain apabila target 4 konferensi cabang di NTT tidak terlaksana dan budget masih tersedia maka budget tersebut akan dialihkan untuk mensupport konferensi cabang di NTB yang pada periode ini tidak mendapatkan alokasi khusus dari support dana program bersama Oxfam.

Capaian dari target di atas adalah terlaksanakannya konferensi cabang I kabupaten Sumba Timur – NTT pada 26 maret 2014, konferensi cabang I kota Kupang – NTT pada 16 Juni 2014, konferensi cabang II kota Bima – NTB dan konferensi cabang I kabupaten Sumbawa Barat – NTB. Melihat pelaksanaan konferensi cabang ini maka **target pelaksanaan konferensi cabang dalam periode program September 2013 – Juni 2014 tercapai 100%**.

Catatan dari masing-masing pelaksanaan konferensi cabang sebagai berikut :

➤ **2.a. Konferensi cabang I kabupaten Sumba Timur – NTT**

Konferensi cabang I kabupaten Sumba Timur dilaksanakan di aula kelurahan Matawai kecamatan kota Waingapu Sumba Timur NTT dibuka oleh bapak Sekda Sumba Timur mewakili Bupati yang berhalangan hadir. Konferensi cabang diawali dengan seminar setengah hari yang bertema “Memantapkan Langkah untuk Memperjuangkan Hak Perempuan Demi Terciptanya Kehidupan Setara, Adil dan Mandiri” dengan narasumber Dian Kartikasari (sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), ketua KPUD Sumba Timur, Siti Suryani (Dosen STIE Kriswina Sumba Timur) dan dimoderatori oleh Pendeta Yuliana Ata Ambu – anggota Koalisi Perempuan Indonesia Sumba Timur. Seminar dan Konfercab diikuti oleh 201 peserta dari 10 balai perempuan yang berasal dari 11 kelompok kepentingan (anggota) ditambah dengan SKPD, pengurus partai politik, caleg laki-laki dan undangan dari lembaga lain yang ada di Sumba Timur. Peserta konfercab sendiri terdiri dari 116 orang dimana pada pemilihan pengurus cabang baru ada 8 kelompok kepentingan yang memenuhi persyaratan untuk memilih koordinatornya untuk duduk sebagai dewan kelompok kepentingan, sementara 3 kelompok kepentingan lain masih harus terus melakukan pengorganisasian dan perekrutan anggota untuk kemudian menyusul menambahkan anggota dewan kelompok kepentingan. Selang satu hari setelah konferensi cabang I dilaksanakan, pengurus cabang terpilih bersama pengurus balai perempuan melakukan rapat kerja cabang I yang difasilitasi oleh Dian

Kartikasari – sekjend Koalisi Perempuan Indonesia bertempat di rumah sekretaris cabang terpilih. Rapat kerja ini menyepakati poin-poin penting yang menjadi program kerja cabang Sumba Timur periode 2014 – 2017.

➤ **2.b. Konferensi cabang I kota Kupang – NTT**



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di hotel Olive kota Kupang. Konferensi cabang ini dihadiri oleh 76 anggota dari 3 balai perempuan yang telah terbentuk di kota Kupang dan juga anggota-anggota yang tersebar di berbagai tempat namun belum memiliki balai perempuan. Hasil Konferensi

cabang adalah: Garis Besar Haluan Kerja Cabang kota Kupang, rekomendasi politik dan pengurus cabang terpilih dengan 4 dewan kelompok kepentingan. Pada tanggal 17 Juni 2014 dilanjutkan dengan rapat kerja cabang yang difasilitasi oleh Khomsanah – presidium nasional Koalisi Perempuan dan Welly Sanith Kono staff pokja Penguatan Organisasi sekretariat nasional. Rakercab I ini menghasilkan program kerja cabang periode 2014-2017 dimana salah satu rekomendasi penting yang harus dilakukan pada tahun 2014 adalah penguatan kapasitas anggota untuk pengorganisasian. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setnas sebelumnya pada perkembangan organisasi di Timor Barat.

➤ **2.c. Konferensi cabang I kabupaten Sumbawa Barat – NTB**

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2014 diikuti oleh 9 Balai Perempuan. Hasil penting dari sidang-sidang komisi dalam konferensi cabang I KSB antara lain pentingnya memperkenalkan Koalisi Perempuan Indonesia secara lebih luas kepada masyarakat KSB agar mendapatkan dukungan untuk gerakan yang dilakukan organisasi di KSB. Selain itu dalam rekomendasi politiknya, cabang KSB juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan termasuk di dalamnya program penyetaraan ijazah melalui kejar paket C (setara dengan SMU). Program ini dipandang penting bagi perempuan di KSB karena tingkat putus sekolah bagi perempuan di KSB masih tinggi, sementara peluang kerja yang ada banyak mensyaratkan ijazah sekolah minimal di tingkat SMU. Hal penting lain juga pada perjuangan keterwakilan politik perempuan dimana caleg juga bersyarat memiliki ijazah minimal SMU. Hasil dari pemilihan

pengurus cabang KSB untuk periode 2014-2017 adalah terpilihnya 7 dewan kelompok kepentingan dan sekretaris cabang. Jumlah dewan kelompok kepentingan yang cukup banyak ini menunjukkan tingkat keragaman anggota Koalisi Perempuan Indonesia di KSB yang cukup tinggi. Artinya organisasi sebetulnya memiliki kekuatan dengan tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan yang berbeda tetapi di sisi lain juga penting diperhatikan manajemen organisasi untuk mengelola kelompok yang berbeda-beda tersebut. Program kerja yang diharapkan mampu menggerakkan organisasi dan bermanfaat besar bagi perempuan dan anak adalah gerakan istbath nikah dan pembuatan akta kelahiran secara massal yang akan segera dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia cabang KSB.

➤ **2.d. Konferensi cabang II kota Bima –NTB**

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2014. Cabang Kota Bima semula merupakan bagian dari cabang Bima di NTB. Kemudian dengan adanya pemekaran pemerintahan di Bima menjadi kota Bima dan kabupaten Bima maka Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan penyesuaian pemekaran cabang. Hal ini terkait erat dengan kerja advokasi kebijakan publik yang akan berhubungan dengan struktur pemerintahan. Cabang kabupaten Bima telah terlebih dahulu melakukan konferensi cabang dalam periode kerjasama dengan Oxfam yang lalu. Kesepakatan waktu itu konferensi cabang kabupaten Bima disebut konferensi cabang I karena sebagian balai-balai perempuan yang berada di kabupaten Bima baru, pengurus cabang Bima berdomisili di kota Bima. Sementara untuk cabang kota Bima, konferensi cabang ini kemudian disebut konferensi cabang II sehingga salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang periode terdahulu. Laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima dengan cukup banyak catatan untuk perbaikan organisasi ke depan. Apalagi konferensi cabang ini memang terlambat cukup lama dari jadwal semestinya yang harus dilakukan 3 tahun sekali dan ketidakaktifan pengurus cabang untuk kerja-kerja organisasi di tingkat kota serta komunikasi dengan balai-balai perempuan. Setelah itu agenda berjalan dengan sidang komisi dan pemilihan pengurus cabang periode 2014-2017. Pengurus cabang terpilih adalah sekretaris cabang yang merupakan sekretaris cabang sebelumnya (incumbent) dengan 5 dewan kelompok kepentingan. Hasil-hasil penting dari sidang komisi dalam konferensi ini antara lain pentingnya cabang kota Bima memantau implementasi program BPJS, pengorganisasian anggota baik berbasis balai

perempuan maupun kelompok kepentingan dengan menggunakan alat pengorganisasian antara lain penguatan ekonomi kelompok, melakukan sosialisasi dan audiensi kepada pemerintah setempat – termasuk pemerintah desa – untuk memperkenalkan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi yang legal di tempat tersebut. Rekomendasi penting lain adalah pengorganisasian kelompok kepentingan anak marjinal dan disable di kota Bima.

3. Pendidikan Pemilih

Pendidikan Pemilih yang dimaksud adalah pendidikan agar pemilih kritis dalam pemilu legislative 2014 yang merupakan pesta demokrasi Indonesia dalam kala lima tahunan. Pendidikan pemilih menjadi salah satu cara Koalisi Perempuan Indonesia dalam kerangka mewujudkan keterwakilan politik perempuan. Karena dalam pendidikan ini peserta akan diajak berdiskusi mengenai pentingnya perempuan duduk dalam lembaga public, sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan public. Tentu yang penting juga adalah mengingatkan para pemilih tentang pentingnya mengawal anggota legislative perempuan terpilih agar tetap konsisten dalam memperjuangkan nasib perempuan, nasib rakyat terpinggir, tidak melakukan korupsi dan hal-hal yang melanggar sumpahnya sebagai wakil rakyat.



Pendidikan Pemilih kali ini menggunakan modul yang dimiliki Koalisi Perempuan Indonesia yang sudah direvisi terutama update aturan pemilu dan partai politik. Revisi modul dilakukan dengan dukungan Program IKAT (Usaid). Tahap berikutnya adalah mempersiapkan fasilitator pendidikan pemilih melalui training of facilitator. Training ini diselenggarakan dengan support program MAMPU (Ausaid) yang dikelola Koalisi Perempuan Indonesia. Peserta ToF dari Nusa Tenggara Barat (NTB) berjumlah 4 orang dan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) 3 orang.

Pendidikan pemilih yang direncanakan dengan support dana dari Oxfam akan dilakukan di NTB dengan target total peserta 360 orang dan di NTT dengan target peserta 600 orang. Capaian dari rencana tersebut di NTB pendidikan pemilih dilakukan di 10 kabupaten/kota dalam 12 kali pelaksanaan. Jumlah peserta pendidikan sebanyak 367 orang. Jika dibandingkan dengan target maka capaian program sebesar 102 %.

Pendidikan pemilih di NTT diselenggarakan di 8 kabupaten/kota dalam 17 kali dengan total peserta 1.042 orang terdiri dari 1.022 perempuan dan 20 laki-laki. Jika dibandingkan dengan target maka capaian program sebesar 174 %. Capaian penting lain di NTT adalah terlibatnya laki-laki sebagai peserta dalam

pendidikan pemilih dimana kelompok tersebut bukan sasaran program pendidikan Koalisi Perempuan Indonesia. Keterlibatan laki-laki atas dasar kebutuhan yang sama akan informasi mengenai pemilu legislative 2014 ini tentunya hal yang membanggakan bagi organisasi kami. Apalagi mereka yang terlibat di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Flores Timur dengan kultur patriarkhi yang masih sangat kental. Dalam proses juga mereka terlibat aktif



dalam diskusi, bersikap menghargai dan menghormati pendapat peserta perempuan dan memberikan masukan-masukan positif bagi organisasi.

Capaian lain adalah terselenggaranya pendidikan pemilih di beberapa tempat secara mandiri oleh masyarakat namun mengundang Koalisi Perempuan Indonesia sebagai fasilitator dan atau narasumber. Pendidikan tersebut memang berbeda dengan modul karena lebih berfokus pada bagaimana cara memilih/mencoblos, sosialisasi bentuk surat suara dalam pemilu legislative 2014. Penambahan tersebut terjadi di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Sayangnya secara jumlah berapa peserta yang mengikuti tidak ada dokumen yang dimiliki organisasi. Di Sumba Barat Daya forum tersebut menggunakan pertemuan posyandu sebanyak 2 kali, di Sumba Tengah bersamaan dengan pertemuan yang diselenggarakan kepala desa sebanyak 2 kali juga.

Temuan dalam pendidikan pemilih baik di NTB maupun di NTT sebagai berikut :

- Tingginya angka buta huruf di perdesaan khususnya dialami oleh perempuan. ada beberapa peserta laki-laki yang mengalami juga (Sumba Tengah) namun karena keterlibatan mereka tidak banyak maka angka yang ditemukan juga kecil.
- Pemilih tidak mengenal warna dengan baik sementara dalam pemilu legislative 2014 kartu suara dibedakan dalam 4 warna sebagai penanda yaitu hijau adalah surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPRD kabupaten/kota, biru adalah surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPRD propinsi, kuning adalah surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPR RI dan merah adalah surat suara yang berisi nama dan foto calon anggota DPD RI propinsi masing-masing.
- Calon pemilih menyatakan kesulitan dengan surat suara yang tidak memuat gambar/foto calon anggota legislative karena rata-rata mereka



tidak hafal dengan nama lengkap calon dan beberapa juga tidak hafal dengan lambang partai politik dimana caleg yang akan dipilih bernaung.

- Kesulitan pemilih lain adalah besarnya lembar surat suara yang harus dibuka, dicoblos lalu dilipat kembali sebanyak 4 lembar tersebut.
- Pemilih yang merupakan penyandang disabilitas netra (tuna netra) tidak disediakan surat suara dengan huruf Braille melainkan dipersilahkan mencoblos dengan didampingi oleh petugas dan atau orang yang dipilih sendiri. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran pada kejujuran dan netralitas pendamping.

Berdasarkan temuan tersebut Koalisi Perempuan Indonesia **merekomendasikan** kepada pihak terkait untuk menjawab tantangan-tantangan sebagai berikut :

- Dalam masa kampanye pemilu legislative 2014 para caleg perempuan harus lebih intensif turun ke daerah pemilihannya (dapil), mendekati konstituen dan calon pemilih. Selain mensosialisasikan visi, misi dan programnya mereka juga harus mensosialisasikan diri dalam surat suara berada di kertas warna apa, nomor urut berapa, partai politiknya bergambar apa dan nomor urut atau posisi partai politiknya dalam surat suara di sebelah mana.

Cara ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemilih terutama yang buta huruf, tidak mengenal warna, lansia dan disable untuk memastikan mereka tidak akan salah mencoblos nama caleg yang dipilih.

- Dalam kerja organisasi selanjutnya Koalisi Perempuan Indonesia harus melakukan pemberantasan masalah keaksaraan sebagai salah satu alat pengorganisasian untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan selanjutnya mendorong perempuan melakukan advokasi hak atas pendidikan dan hak atas informasi bagi perempuan.
- Dalam kerja organisasi selanjutnya penting untuk melakukan upaya perluasan pendidikan politik untuk perempuan dan masyarakat secara umum dan lebih intensif menjalin kerjasama dengan para pihak yang melakukan kerja-kerja serupa dan atau mereka yang sesungguhnya berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

4. Workshop Calon Anggota Legislatif Perempuan tentang Manajemen

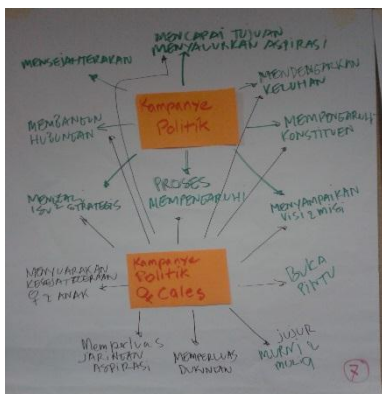
Kampanye. Terobosan demokrasi yang diusung dan dikembangkan Koalisi Perempuan Indonesia bukan hanya menuntut keterwakilan politik perempuan di parlemen dan lembaga public lain. Namun secara sistematis Koalisi Perempuan Indonesia menyiapkan sejumlah perangkat untuk

mendukung terwujudnya keterwakilan politik dan kepemimpinan perempuan. Perangkat yang disiapkan antara lain berupa system pendidikan – pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik. Pendidikan politik kepada dilakukan kepada mereka yang menjadi pemilih dalam pesta demokrasi maupun yang terlibat langsung sebagai calon anggota legislative (caleg). System ini masih dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas anggota legislative perempuan (yang terpilih) agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Selain melalui pelatihan dan atau workshop, upaya-upaya di atas juga



dilakukan dengan berbagai bentuk seperti seminar, dialog public, diskusi terbatas, talkshow (melalui media massa), kampanye di media social, penerbitan dan distribusi KIE, dan kerja-kerja bersama lembaga lain. Pendidikan untuk pemilih telah diuraikan di atas sebagai salah satu system yang dikembangkan dan dikerjakan Koalisi Perempuan Indonesia. Bagi mereka yang menjadi caleg, Koalisi Perempuan Indonesia

telah mengembangkan 2 modul yaitu Ketrampilan Politik yang berisi penggalan dasar-dasar berpolitik bagi perempuan, membangun visi politik perempuan hingga bagaimana mempersiapkan diri untuk memenangkan hati pemilih. Modul yang ke-2 yaitu Manajemen Kampanye, porsi terbesarnya adalah menggali dan merencanakan kampanye yang efektif agar dapat memenangkan pemilihan. Kedua modul tersebut idealnya dilatihkan atau menjadi pegangan workshop caleg perempuan secara berkelanjutan – diikuti oleh peserta yang sama. Namun dalam system pemilu legislative kita dimana peranan partai politik dalam menentukan caleg masih cukup dominan, terdapat kemungkinan caleg yang mengikuti pelatihan sebelum masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ternyata gugur sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan sebagai caleg lagi.



Program support Oxfam di NTB dan NTT bagi Koalisi Perempuan Indonesia telah memberikan support untuk pelatihan Ketrampilan Politik yang dilakukan setelah pengumuman daftar calon sementara (DCS) dan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Hal tersebut dilakukan dengan harapan setelah pelatihan, caleg perempuan dapat lebih memantapkan rumusan visi politiknya, dapat melakukan lobby dan memiliki posisi tawar

didepan partai politiknya. Posisi tawar ini terutama terkait dengan posisi daerah pemilihan (dapil) dimana mereka ditempatkan. Karena dalam masa antara DCS ke DCT, masih terbuka peluang caleg untuk berpindah dapil. Harapannya caleg perempuan mendapatkan dapil dimana dia sudah dikenal baik oleh calon pemilihnya secara luas, dapil dimana dia sudah melakukan kerja social-politik sebagai investasinya. Pelatihan Manajemen Kampanye dilakukan setelah pengumuman DCT dengan harapan mereka yang sudah masuk DCT akan lebih mantap dengan rencana kampanye yang telah disusun bersama tim kerja dan atau bagi yang belum memiliki rencana yang matang, maka workshop ini sekaligus menjadi ruang untuk menyusun rencananya.

Rencana workshop Manajemen Kampanye yang disupport Oxfam periode ini ditargetkan dilakukan di NTB dan NTT masing-masing 1 kali workshop dengan target jumlah peserta masing-masing maksimal 25 orang. Capaian dari rencana tersebut, terlaksana workshop 1 kali di NTB yang difasilitasi oleh Dian Aryani (dewan ahli Koalisi Perempuan Indonesia wilayah NTB) dan Sutriyatmi (Koordinator Pokja Penguatan Organisasi Setnas) dengan jumlah peserta di NTB sebanyak 26 peserta. Terlaksana 1 kali workshop di NTT yang difasilitasi oleh Dr. Titiek Kartika Hendrastiti (kader Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Bengkulu – mantan presidium nasional periode 2004-2009) dan Sutriyatmi (Koordinator Pokja Penguatan Organisasi) dengan peserta sebanyak 27 orang dan menghadirkan 2 narasumber (L) yaitu bapak John Depa ketua KPU Propinsi NTT dan staff KPU Propinsi NTT yang menjelaskan tentang teknologi informasi yang digunakan KPU dalam pemilu legislative 2014. Jika melihat capaian tersebut maka **dari sisi jumlah peserta di NTB tercapai 104% dan di NTT mencapai 108% dan dari sisi target pelaksanaan maka pelaksanaan workshop tercapai 100%.** Menurut keterangan peserta, materi Manajemen Kampanye yang sangat diperlukan dan langsung digunakan oleh peserta terutama pada cara melakukan identifikasi konstituen, menghitung pemilih loyal dan pemilih mengambang, alat-alat bantu memantau perkembangan dalam masa kampanye dan matematika pemilu yang akan digunakan pada proses penghitungan suara.

Capaian penting lain dalam peningkatan kapasitas caleg perempuan adalah permintaan lembaga lain di NTT kepada Koalisi Perempuan Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan caleg perempuan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. *Pertama* pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Donders (YSD) Sumba Barat Daya bekerjasama dengan Program Access Phase II untuk pelatihan caleg perempuan di SBD. Pelatihan ini difasilitasi oleh Sutriyatmi



(Koordinator Pokja Penguatan Organisasi Setnas) bersama dengan Imelda Sulis Seda (YSD) dengan materi pelatihan yang memadukan antara modul ketrampilan politik dengan manajemen kampanye. Dari modul ketrampilan politik diambil materi utama membangun visi politik perempuan dan memenangkan hati pemilih, kemudian dari modul manajemen kampanye diambil materi matematika pemilu dan membangun tim kerja. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 28 caleg perempuan, 4 diantaranya anggota Koalisi Perempuan Indonesia, 2 diantara peserta pelatihan juga peserta pelatihan ketrampilan politik yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia dengan support program Oxfam sebelumnya. Pelatihan ini juga menghasilkan kesepakatan adanya pertemuan rutin caleg perempuan SBD yang difasilitasi Koalisi Perempuan Indonesia cabang SBD dan YSD untuk saling menguatkan sesama caleg perempuan dan membangun gerakan politik yang bersih dan damai.

Kedua, pelatihan kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Sumba Tengah yang meminta Koalisi Perempuan Indonesia sebagai narasumber untuk materi Kepemimpinan Perempuan dan Keterwakilan Politik Perempuan. Pelatihan yang difasilitasi oleh Mikhael Keraf CsSr dari YSD diikuti oleh 17 caleg perempuan dari Sumba Tengah. 5 orang dari peserta merupakan anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang telah mendapatkan 2 pelatihan caleg oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Pelatihan ini dikembangkan dari gagasan awal Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sumba Tengah yang akan menyelenggarakan pertemuan caleg perempuan Sumba Tengah, namun kemudian ditangkap peluangnya oleh Biro PPKB untuk sekaligus dijadikan forum pelatihan 2 hari. Koalisi Perempuan Indonesia mengambil peluangnya menjadi forum untuk penguatan caleg perempuan termasuk dalam melakukan politik yang bersih. **Salah satu kesepakatan penting diujung pelatihan ini adalah gagasan forum refleksi paska pileg di Sumba Tengah, dimana mereka meminta Koalisi Perempuan Indonesia yang memfasilitasi pertemuan tersebut.**

Dari capaian di atas, ditemukan pembelajaran tentang pentingnya peningkatan kapasitas perempuan yang akan masuk ke partai politik, mencalonkan diri sebagai caleg dan atau kepala daerah sangat penting dilakukan secara intensif, bukan hanya pada waktu menjelang pemilihan saja. Selain itu juga kerja-kerja nyata di masyarakat yang dilakukan oleh perempuan harus ada dokumentasi yang lebih rapi dan rinci sehingga dapat menjadi bukti perempuan kepada pihak-pihak yang sering menganggap sebelah mata kemampuan perempuan. Misalnya dalam konteks pileg, dokumentasi proses dan hasil kerja perempuan dapat menjadi alat bargain perempuan untuk mendapatkan dapil yang baik dan membuka peluang

menang bagi perempuan lebih besar. Selain itu posisi perempuan dalam partai politik masing-masing juga penting diperjuangkan. Oleh karena itu organisasi sebaiknya semakin serius dalam mempersiapkan perempuan untuk duduk dalam kepengurusan partai politik, bukan hanya di organisasi sayap partai.

b. Reformasi Kebijakan Publik

1. Jejaring Caleg Perempuan

Aktivitas jejaring caleg perempuan ini memiliki diharapkan mampu melahirkan inisiasi jaringan perempuan dan politik di tingkat kabupaten dengan target minimal terlaksana pertemuan di tingkat kabupaten, NTT terlaksana di 2 kabupaten dan NTB di 4 kabupaten. Ke depan diharapkan jaringan ini terus bertumbuh dan solid sehingga dapat menjadi jaringan perempuan dan politik hingga di tingkat propinsi masing-masing.

Upaya membangun jejaring ini dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dari rencana di atas, capaiannya sebagai berikut :

1.1. Nusa Tenggara Timur :

Dalam pelatihan caleg perempuan di NTT tahap yang kedua (Manajemen Kampanye) sudah disepakati rencana untuk menunjukkan kebersamaan caleg perempuan dan sekaligus menjadi ajang kampanye mewujudkan keterwakilan politik perempuan yang diperjuangkan oleh politisi perempuan lintas parpol bersama gerakan perempuan di NTT. Rencana tersebut akan dituangkan dengan kegiatan serentak mengambil moment hari valentine pada bulan februari 2014. Dalam forum pelatihan memang belum disepakati bentuk kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota dan mereka berencana menyusun dan memutuskan sendiri. Harapannya dengan kegiatan serentak ini akan menggaungkan lebih besar tentang perjuangan caleg perempuan untuk kemajuan masyarakat dan diharapkan berdampak positif pada terpilihnya caleg perempuan di NTT dan meningkatnya jumlah anggota legislative perempuan di NTT.

- ❖ **Cabang Sumba Barat Daya (SBD)** melakukan pertemuan antar caleg perempuan (lintas partai politik) sebanyak 2 kali pra pencoblosan. Pertemuan ini difasilitasi oleh Wilhelmina M. Dappa (sekretaris cabang SBD) bersama dengan Imelda Sulis Seda dan Stefanus Segu (YSD) secara bergantian. Pertemuan pertama menggunakan ruang aula YSD dan pertemuan kedua menggunakan rumah sekcab Koalisi Perempuan Indonesia SBD. Dalam pertemuan tersebut terjadi sharing pengalaman antar caleg perempuan yang sudah beberapa kali menjadi caleg, caleg yang sudah pernah terpilih menjadi aleg dan para caleg yang baru kali

ini mencalonkan diri. Pertemuan juga memperdalam materi-materi pelatihan yang pernah diikuti baik di Koalisi Perempuan Indonesia maupun di YSD. Dalam pertemuan juga dilakukan identifikasi persoalan-persoalan dapil yang kemudian diolah bersama menjadi isu kampanye bagi caleg perempuan. Persoalan penting yang ditemukan hampir di semua dapil di SBD adalah tingginya angka KDRT, pembangunan sarana-prasarana transportasi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, akses masyarakat pada energy listrik dan air bersih, kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan bagi perempuan. Catatan penting dari caleg perempuan yang mengikuti aktivitas ini adalah pentingnya membangun ruang belajar dan komunikasi antar perempuan yang terjun di dunia politik untuk saling menguatkan dan mewujudkan keterwakilan politik perempuan. Pertemuan-pertemuan ini juga terlaksana dengan tingkat keswadayaan peserta pertemuan yang cukup tinggi, tidak meminta fasilitas dari Koalisi Perempuan Indonesia maupun YSD secara berlebihan.

- ❖ **Cabang Sumba Tengah** menginisiasi jejaring caleg perempuan dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti KPUD dan Panwaslu. Pengurus cabang Sumba Tengah memiliki kelebihan dalam kesabaran dan ketekunan untuk melakukan pendekatan personal – satu per satu – baik kepada caleg perempuan maupun lembaga lain yang diajak untuk mendukung terwujudnya keterwakilan politik perempuan. Pertemuan pertama terjadi dengan fasilitas tempat di Yayasan Wahana – sebuah NGO Sumba Tengah yang telah lama bergerak di isu layanan public. Pertemuan ini menjadi forum diskusi, berbagi pengalaman dari caleg perempuan yang mengikuti pelatihan caleg di Koalisi Perempuan Indonesia. Dalam pertemuan juga hadir komisioner KPUD Sumba Tengah sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai aturan-aturan terkait kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara. Pertemuan kedua adalah keterlibatan semua dalam acara gerak jalan sehat yang diselenggarakan oleh KPUD Sumba Tengah. dalam acara tersebut dilakukan sosialisasi pemilu oleh KPUD kepada masyarakat secara luas. Gerak jalan ini juga menjadi ruang bagi caleg perempuan untuk memperkenalkan diri pada masyarakat yang hadir atau yang menyaksikan gerak jalan di sepanjang jalan. Pertemuan ketiga dilakukan dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan forum diskusi caleg perempuan dengan materi-materi penting sebagai bekal memasuki masa kampanye terbuka. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati partisipasi

caleg perempuan bukan hanya pada kehadiran aktif tetapi juga iuran untuk membiayai pertemuan. Namun kemudian rencana acara diskusi tersebut diambil alih pelaksanaannya oleh biro PPKB Sumba Tengah dengan menggunakan alokasi anggaran yang dimiliki biro untuk pelatihan kepemimpinan perempuan, sehingga Koalisi perempuan batal menjadi bagian dari penyelenggara, tetapi diundang sebagai narasumber (ada dalam laporan di atas, bagian workshop caleg perempuan).

- ❖ **Cabang Ngada, Sikka dan Flores Timur** menyelenggarakan pertemuan lebih sederhana dengan peserta pertemuan caleg perempuan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan agenda pertemuan persiapan kampanye terbuka, relawan saksi dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia pada saat penghitungan suara. Cabang Flores Timur semula merencanakan acara debat caleg perempuan namun batal karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi. Selain itu kecurigaan masyarakat pada aktivitas Koalisi perempuan Indonesia juga cukup tinggi, mereka mengira kegiatan tersebut adalah kegiatan partai politik tertentu atau hanya akan memenangkan caleg tertentu saja.

1.2 Nusa Tenggara Barat :



Inisiasi untuk membangun jejaring dan kerja sama juga dilakukan melalui aksi bersama. Di NTB, aksi bersama dilakukan dalam Rangka Peringatan Hari Ibu ke 85 tahun dilaksanakan Gerak Jalan Berjalan dengan Thema “ 1000 langkah menuju Kepemimpinan Perempuan”.

Gerak jalan ini dipusatkan di Lombok Tengah dengan dihadiri oleh caleg perempuan dari Gerindra, Golkar, PDI

Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB dan PPP. Selain itu juga hadir istri bupati Lombok Tengah, wakil bupati dan istri, dharma wanita, PKK, anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari Lombok Tengah dan sekitarnya.

Rangkaian acara dimulai dengan senam bersama, ziarah ke taman makam pahlawan dilanjutkan dengan dialog. Peserta yang hadir menyampaikan keluhannya kepada caleg perempuan dan pihak eksekutif yang hadir persoalan-persoalan seperti tingginya angka kematian bayi baru lahir, angka kematian ibu melahirkan, tingginya persoalan gizi buruk dan kurang gizi, jangkauan imunisasi pada bayi yang terbatas dan tingginya angka putus sekolah.

Dalam pertemuan ini para caleg yang hadir dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan-persoalan melalui kebijakan publik yang akan mereka hasilkan. Selain itu juga caleg perempuan lintas partai bersepakat untuk memperjuangkan isu-isu tersebut jika nanti mereka menjadi anggota legislatif. Yang penting juga adalah antar caleg perempuan yang hadir tidak terjadi *sikut-menyikut* atau gesekan dalam proses pemilu legislatif nanti dan mereka bersepakat untuk sama-sama mengajak konstituen masing-masing mewujudkan pemilu yang bersih dan damai.



Pertemuan untuk membangun jejaring caleg perempuan juga dilakukan di Sumbawa. Pertemuan ini menjadi ruang bagi caleg perempuan dan perwakilan organisasi yang hadir untuk berbagi informasi dan menguatkan caleg perempuan dalam menarik simpati calon pemilih. Dari pertemuan ini diharapkan caleg perempuan akan semakin terasah kemampuannya dalam melihat persoalan dapil dan mampu mengkomunikasikannya kembali dalam masa kampanye maupun nantinya jika menjadi anggota legislative.

Selain pertemuan caleg perempuan dengan organisasi-organisasi di Sumbawa juga dilakukan pertemuan antara caleg perempuan dengan KPU kabupaten Sumbawa. Dalam pertemuan ini KPU kembali menyampaikan aturan-aturan penting yang harus diketahui oleh caleg perempuan dan juga berharap para caleg dapat menyampaikannya kepada para calon pemilih. Dengan demikian harapan KPU selain pileg berjalan dengan lancar dan tertib, para caleg perempuan juga tidak dirugikan oleh perilaku pendukungnya yang melanggar aturan karena ketidaktahuan.

2. Pengawasan Suara Caleg Perempuan

Proses pengawasan suara perempuan dilakukan secara sukarela oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia dengan berbagai cara. Pengawasan dilakukan sejak penghitungan suara di masing-masing TPS pada hari pencoblosan, penghitungan di tingkat desa/kelurahan, penghitungan di tingkat kecamatan dan penghitungan di tingkat kabupaten/kota. Relawan Koalisi Perempuan Indonesia terutama mengawal suara caleg perempuan baik mereka yang merupakan anggota Koalisi Perempuan Indonesia maupun caleg perempuan yang bukan anggota namun berada di dapil masing-masing.

Pengalaman dan temuan dari pengawasan suara ini sebagai berikut :

- Penghitungan suara berlangsung hingga malam hari sehingga beberapa saksi perempuan kesulitan untuk mengikuti hingga akhir.

Hal ini karena beban ganda perempuan dimana mereka masih harus menyelesaikan tugas domestic rumah tangganya. Dilema bagi saksi perempuan jika mereka tidak menunggu sampai selesai maka tidak dapat mengawasi dengan baik proses penghitungan dan pengesahan suara.

- Akibat dari tidak adanya saksi yang dimiliki oleh caleg perempuan, terjadi kasus-kasus kecurangan. Contoh yang dialami Margaretha Pujiharwanti caleg DPRD Propinsi NTT dapil Sumba dari PDIP. PPK di kecamatan Wewewa Tengah SBD salah menghitung jumlah perolehan suaranya dan suara caleg lain. Setelah kasus ini dilaporkan ke KPUD, Panwas, diproses di dalam partai politiknya, suara mama Rita kembali sekitar 200 suara. Namun jumlah ini belum cukup sehingga mama Rita tetap tidak mendapatkan kursi DPRD propinsi.
- Copy dari formulir c1 yang merupakan bukti awal perolehan suara di TPS seringkali sulit diakses oleh caleg perempuan. Padahal penting bagi semua caleg untuk memilikinya agar dia dapat mengetahui secara persis hasil penghitungan di tiap-tiap TPS dalam dapilnya. Akibat dari kesulitan mengakses formulir ini, ada 1 orang caleg perempuan di Sumba Tengah dan 1 di SBD yang menengarai kecurangan caleg satu partainya mencuri suara sehingga hasil akhir di KPU mereka tidak mendapatkan kursi DPRD.

Pasca pemilu legislatif dilakukan pertemuan Refleksi Caleg Perempuan dengan mengambil sampel pertemuan caleg perempuan Sumba-NTT.

Pertemuan ini memanfaatkan sisa alokasi dana beberapa kegiatan. Pilihan mengambil Sumba karena dalam periode 2009-2014, dua kabupaten di Sumba yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah tidak ada anggota DPRD perempuan yang duduk. Pertemuan dilakukan pada Mei 2014 bertempat di puspas Katikuloku Sumba Tengah dengan pertimbangan tempat yang berada diantara semua kabupaten di Sumba. Pertemuan ini dihadiri oleh caleg-caleg perempuan Sumba yang mengikuti pelatihan caleg Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan pengurus-pengurus cabang yang ada di Sumba dan dihadiri oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Tengah.

Catatan dari Refleksi Caleg Perempuan Sumba sebagai berikut :

- Pendidikan atau pelatihan bagi caleg perempuan yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia di NTT, lembaga lain yang bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia sangat bermanfaat bagi para caleg. Materi yang bermanfaat bukan hanya yang terkait dengan teori politik namun ketrampilan-ketrampilan seperti matematika pemilu, analisis dapil dan konstituen.

- Peningkatan kapasitas bagi politisi perempuan dibutuhkan bukan hanya menjelang pemilihan saja, namun sebaiknya dilakukan terus-menerus agar politisi perempuan semakin siap menghadapi berbagai tantangan. Misalnya yang penting juga bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan partai politik dan menduduki posisi strategis dalam parpolnya.
- Pendidikan politik bagi masyarakat pemilih yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia juga dirasakan manfaatnya oleh caleg perempuan dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia yang hadir. Namun catatan penting mereka pendidikan politik sebaiknya juga dilakukan terus-menerus, terutama dalam membangun kesadaran tentang pentingnya keterwakilan politik perempuan.
- Perolehan suara caleg perempuan di Sumba NTT memang jauh dari harapan. Terutama jika melihat mereka yang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten maupun propinsi. Namun capaian tersebut dianggap cukup sebagai bagian dari pendidikan politik bagi caleg dan pemilih. Capaian saat ini di Sumba Timur terpilih 2 orang perempuan, Sumba Tengah 0 perempuan, Sumba Barat 4 perempuan dan Sumba Barat Daya 0 perempuan. Dari jumlah tersebut ada 1 caleg perempuan yang menjadi aleg perempuan di Sumba Barat yang secara intensif berdiskusi dan mengikuti 2 kali pelatihan caleg Koalisi Perempuan Indonesia yaitu ibu Christina Lali Ndelo dari partai Golkar. Kesuksesan ibu Christina menjadi *kebanggaan* sendiri bagi caleg-caleg perempuan yang aktif berdiskusi dan menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

3. Kerjasama Media untuk Kampanye “Perempuan dan Pemilu

Kerjasama ini direncanakan akan dilakukan satu kali di tingkat nasional dengan harapan TV nasional yang menyiarkan dapat diakses oleh calon pemilih secara luas. Kampanye ini tidak mengkhususkan pada caleg perempuan di tingkat pusat dan atau di dapil tertentu melainkan kampanye untuk mendukung terwujudnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative melalui pemilu legislative 2014.

Capaian dari rencana di atas adalah terlaksananya talkshow bekerja sama dengan Tempo TV dan jaringan KBR68 melalui acara berjudul PILAR DEMOKRASI dengan tema “Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan Pemenuhan HAM” pada tanggal 16 Desember 2013 selama 1,5 jam. Acara ini disiarkan di channel 918 AORA TV, 47 TV local di Indonesia dan dimuat di website KBR68.

Talkshow menghadirkan narasumber ibu Attas Hedartini - aktivis dan peneliti hak-hak asasi perempuan – yang menyampaikan tentang makna pemenuhan HAM yaitu untuk memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi. Sebagai anggota dewan yang merupakan wakil rakyat nantinya, caleg

perempuan diminta untuk menggunakan kewenangannya dalam pemenuhan HAM rakyat Indonesia. Selain itu tentunya dalam kehidupan sehari-hari mereka juga harus melaksanakan pemenuhan hak asasi. Misalnya saat merespon atau memberikan pernyataan mengenai suatu isu atau kejadian, anggota dewan hendaknya tetap dalam kerangka pemenuhan HAM. Tidak seperti kasus-kasus anggota dewan (pusat) saat ini yang banyak memberikan pernyataan yang melecehkan dan menyalahkan rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Selain itu dalam masa reses atau penjangkaran aspirasi, anggota dewan seharusnya benar-benar datang ke dapil dan bertemu konstituen untuk melihat langsung situasi pemenuhan hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga Negara, dan mendengar langsung keluhan atau persoalan-persoalan yang harus dituntaskan melalui intervensi kebijakan.

Narasumber yang lain adalah ibu Dian Kartikasari sekretaris jendral Koalisi Perempuan Indonesia yang menyampaikan makna keterwakilan politik perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan khususnya legislative. Fungsi dan kewenangan anggota dewan yang dapat berpengaruh pada pemenuhan HAM seperti fungsi budgeting dimana dewan dapat mendorong pemerintah untuk menyusun anggaran dengan alokasi yang besar bagi program-program pemenuhan HAM seperti anggaran untuk pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal yang layak juga hak untuk bebas dari rasa takut. Fungsi pengawasan anggota dewan harusnya memastikan pemerintah menjalankan tugas dengan benar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi dimana anggota dewan dapat membuat aturan perundangan dan atau aturan daerah yang tidak diskriminatif dan memastikan aturan tersebut memenuhi HAM. Fungsi aspirasi ini terkait dengan bagaimana mereka mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam dialog ini juga menghadirkan 20 peserta perempuan dan 5 peserta laki-laki yang merupakan caleg dari berbagai partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilu legislative 2014. Selain peserta yang hadir langsung di tempat acara, pendengar juga dapat melakukan dialog interaktif untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Sebagian peserta dan pendengar menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, telah memahami bahwa hak-haknya selama ini banyak dilanggar. Antara lain dalam berbagai kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya air bersih, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan minimnya akses perempuan pada layanan publik lain. Peserta talkshow yang merupakan calon anggota legislative perempuan dan calon anggota DPD RI perempuan juga menyampaikan informasi dan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak kesehatan reproduksi perempuan.

4. Dialog Publik “Perempuan dan Pemilu”

Dialog public ini diharapkan akan menyumbang pada peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan public. Karena dialog public yang diselenggarakan diharapkan akan menghadirkan caleg perempuan dan penyelenggara pemilu sebagai narasumber dengan peserta masyarakat calon pemilih dan konstituen para caleg. Selain itu juga harapannya dialog ini akan diliput dan diberitakan di media massa sehingga pikiran-pikiran yang disampaikan caleg perempuan akan dapat diketahui masyarakat secara luas. Dari hal tersebut caleg perempuan dapat memperoleh dukungan suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat.



Dialog public yang disupport program Oxfam periode ini memiliki target akan diikuti oleh 75 peserta di NTT dan 60 peserta di NTB. Target lainnya adalah adanya 6-9 calon anggota legislative peserempuan yang memaparkan visi misinya dalam dialog public. Capaian dari rencana di atas adalah pelaksanaan dialog public di NTB terselenggara dua kali di kota Bima untuk peserta dari pulau Sumbawa – NTB dan di kota Mataram dengan peserta dari pulau Lombok – NTB. Pelaksanaan di NTT juga dua kali yaitu di kota Maumere cabang Sikka untuk peserta dari pulau Flores dan di Waingapu Sumba Timur untuk peserta dari pulau Sumba – NTT. Jumlah peserta yang hadir dalam dialog masing-masing di Bima – NTB sebanyak 75 orang (70 P dan 5L), di Mataram sebanyak 72 (56P dan 16L). jumlah tersebut dihitung dari jumlah mereka yang mengisi daftar hadir. Namun kehadiran riil melebihi jumlah yang tertulis dalam daftar hadir. Hal ini diketahui dari jumlah makanan yang kurang (hitung piring a la hotel) di kota Mataram dimana hotel menyediakan 100 piring namun sebelum semua peserta dan panitia makan ternyata piring



sudah habis. Jumlah di NTT peserta di Sumba Timur sebanyak 119 (111P dan 8L) dan di Sikka sebanyak 133 peserta (128P dan 5 L).

Di Bima (NTB) dan Sumba Timur (NTT) acara dialog public dihadiri oleh walikota dan bupati setempat yang menyatakan memberikan dukungan pada upaya membangun demokrasi yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Di Sumba Timur khususnya, acara

dialog semacam ini memang baru pertama kali dilakukan, apalagi dengan kekhususan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

lembaga legislative. Di keempat tempat pelaksanaan dialog public dihadiri oleh penyelenggara pemilu setempat, baik KPU daerah maupun panwaslu. Mereka semua memberikan masukan kepada para caleg perempuan untuk memperhatikan aturan-aturan terkait pelaksanaan pemilu agar tidak mendapatkan kerugian dan atau menjadi korban kecurangan. Selain itu mereka juga memberikan masukan kepada calon pemilih untuk betul-betul memperhatikan langkah demi langkah dalam pemilu agar tidak merugikan atau kehilangan hak mereka sebagai pemilih dan tidak merugikan caleg yang didukungnya.

Selain pimpinan daerah dan penyelenggara pemilu, dialog public juga menghadirkan biro dan atau badan pemberdayaan perempuan setempat untuk mengetahui bagaimana komitmen eksekutif dalam mewujudkan program-program pengarusutamaan gender termasuk dalam mendorong dan meningkatkan kepemimpinan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam politik. Mereka juga memberikan masukan kepada para caleg mengenai isu-isu krusial yang harus menjadi perhatian caleg perempuan baik pada masa kampanye maupun ketika nanti duduk menjadi anggota dewan. Sebagian besar isu yang disampaikan adalah tentang angka kematian ibu dan balita, pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak dan perempuan serta air bersih yang memadai untuk setiap keluarga. Di NTB khususnya pulau Sumbawa juga ditekankan tentang bagaimana melindungi dan membantu buruh migrant dan keluarganya yang banyak mengalami kasus kekerasan dan penipuan.

Selain itu juga hadir para caleg perempuan yang sudah berpengalaman terpilih sebagai anggota legislative perempuan. Di Sumba Timur dialog menghadirkan Sarah Lerry Mboei anggota DPD RI daerah pemilihan NTT – beliau juga anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Kupang NTT. Namun karena kesibukannya ibu Sarah hadir sehari sebelumnya dan berdialog malam hari dengan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur yang telah hadir di tempat pertemuan. Dalam dialog tersebut ibu Sarah menyampaikan bagaimana tips dan trik memenangkan pemilihan dan bagaimana perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang wakil rakyat ketika mereka telah duduk sebagai anggota dewan.

c. Jejaring Kerja Organisasi

Dalam kerangka kerja Koalisi Perempuan Indonesia, membangun jaringan dan bekerjasama dengan berbagai lembaga merupakan salah satu tantangan tersendiri karena tidak semua lembaga dapat bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan sebaliknya. Di dalam AD ART organisasi tegas dituliskan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang

memiliki visi misi yang sejalan dan atau lembaga yang tidak melanggar nilai, prinsip dan asas organisasi.

Ada banyak konteks atau latar belakang dimana organisasi dapat membangun kerjasama. Antara lain kerjasama dapat dibangun untuk jangka pendek atau jangka tertentu saja, kerjasama dapat dibangun juga untuk jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu kerjasama dapat dibangun untuk isu tertentu misalnya isu yang terkait dengan kelompok kepentingan atau isu besar seperti keterwakilan politik perempuan.

Dalam periode kerjasama dengan Oxfam kali ini jejaring kerja yang terbangun dan menguat secara umum sebagai berikut :

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu : KPU, KPUD dan Panwaslu

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan keterwakilan politik perempuan membangun komunikasi dengan lembaga penyelenggara pemilu. Misalnya dengan terlibat sebagai penyusun modul pendidikan pemilih yang disusun dan diterbitkan atas nama KPU, mendorong anggota dimana saja untuk aktif terlibat sebagai relawan demokrasi yang dikoordinir oleh KPU dan panwaslu di masing-masing daerah.

Di kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah baik KPU maupun panwaslu menyatakan komitmen untuk merekrut relawan demokrasi dan melibatkan mereka yang dari Koalisi Perempuan Indonesia karena diketahui telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyelenggaraan pemilu dan didukung oleh organisasi.

Anggota di Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara terlibat aktif sebagai Relawan Demokrasi di kedua lembaga tersebut.

2. Eksekutif : Pemerintah Desa, Dinas-dinas di Pemda

Sebagaimana telah dituliskan di atas, balai-balai perempuan dan cabang hingga wilayah (NTB) aktif bekerjasama dengan pemerintah untuk berbagai isu. Mulai dari KDRT, buruh migran, hak anak, hak atas identitas yang legal (surat nikah), penguatan ekonomi dan sosialisasi aturan-aturan daerah yang penting untuk diketahui masyarakat dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia dengan para pihak eksekutif ini.

Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia di beberapa tempat juga diminta memberi masukan oleh para kepala desa hingga diminta untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemdes. Contoh cabang Sumba Tengah diminta melatih ketrampilan membuat pupuk organik di 3 desa oleh bapak kepala desa, cabang Sikka juga sama plus dengan melatih pengolahan pangan lokal, cabang Flores Timur memberi masukan mengenai pembangunan jalan desa yang sudah bertahun-tahun dalam kondisi rusak.

3. Lembaga Non Pemerintah Lain

- Untuk mewujudkan keterwakilan politik perempuan di tingkat nasional Koalisi Perempuan Indonesia aktif di Jaringan Perempuan Politik dan periode ini menjadi koordinator jaringan tersebut.
- Di semua tingkatan Koalisi Perempuan Indonesia juga membangun jaringan dengan media massa.
- Di NTB Koalisi Perempuan Indonesia masuk dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang aktif melakukan advokasi layanan publik.
- Selain itu cabang-cabang di NTB juga aktif mendorong keterwakilan politik perempuan bersama dengan organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
- Di NTT masing-masing cabang membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga local termasuk dengan pihak gereja.

d. Kelembagaan

1. Konsolidasi Pra Pelaksanaan Program

Pertemuan bersama pengurus balai perempuan, cabang dan wilayah penting dilakukan untuk kembali saling mengingatkan rencana kerja yang telah disepakati dan akan dijalankan. Pertemuan pra pelaksanaan program juga penting dilakukan untuk mengingatkan kembali aturan kerja dalam organisasi dan aturan yang terkait dengan lembaga yang mensupport pendanaan kerja organisasi.

Konsolidasi dilakukan di tingkat sekretariat nasional dalam forum rapat pleno untuk melihat agenda kerja secara keseluruhan pada bulan September 2013. Dalam forum tersebut juga dibicarakan mengenai penanggungjawab pelaksanaan tiap item kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.

Konsolidasi sekretariat nasional dengan pengurus wilayah, cabang dan balai perempuan di NTB dilakukan pada tanggal 17-18 Oktober 2013 bertempat di hotel mataram square – kota mataram. Dalam pertemuan ini selain bersama-sama melihat kembali target-target kerja organisasi juga menjadi forum kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan yang disupport Oxfam karena jumlah support dana tidak cukup untuk mengcover semua kegiatan. Misalnya untuk pelaksanaan dialog publik yang ditargetkan 2 kali pelaksanaan disepakati akan dilakukan 1 kali di pulau lombok dan 1 kali di pulau sumbawa. Kesepakatan lain pelaksana kegiatan yang disupport oleh Oxfam akan dibagi agar semua cabang dan kabupaten mendapatkan peluang untuk belajar mengelola program yang disupport lembaga donor. Pertemuan setnas dengan wilayah NTB dilanjutkan oleh pengurus wilayah NTB bersama

pengurus cabang dan balai perempuan yang hadir untuk melaksanakan rapat kerja wilayah NTB.

Konsolidasi sekretariat nasional dengan pengurus cabang dan balai perempuan di NTT dilaksanakan di hotel monalisa – waikabubak – sumba barat pada tanggal 25-26 2013. Tempat pertemuan dipilih di Sumba dengan harapan pengurus cabang dan balai perempuan dari pulau Flores dan Timor Barat berkesempatan mengunjungi pulau sumba dan dapat memberikan masukan-masukan pada kawan-kawannya di Sumba untuk memotivasi mereka dalam berorganisasi. Sebelumnya pengurus cabang dan balai perempuan dari Sumba dan Timor Barat telah berkesempatan mengikuti pertemuan monev di Sikka – Flores sekaligus belajar langsung pada balai-balai perempuan di sana. Pertemuan di NTT ini juga menghadirkan pengurus balai-balai perempuan di Sumba Timur dan Sumba Barat yang sebagian besar masih baru terbentuk dan juga baru akan bekerja bersama dalam support program Oxfam. Sebelumnya mereka diorganisir dan melakukan kegiatan organisasi dengan support program Access Phase II yang bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Meskipun kerangka dasarnya sama yaitu kerangka kerja Koalisi Perempuan Indonesia namun sedikit banyak ada perbedaan karena lembaga yang mendukung berbeda. Contoh paling penting dan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kegiatan yang disupport program Access biasanya peserta mendapatkan perdiem harian namun dalam kegiatan yang disupport program Oxfam kebiasaan tersebut tidak ada. Ini penting untuk disosialisasikan dan diingatkan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman dan motivasi yang berbeda bagi orang yang akan terlibat dalam kegiatan. Selain itu juga kembali disosialisasikan aturan-aturan organisasi terkait dengan pengajuan dana kegiatan dan pelaporan.

2. Pengelolaan kesekretariatan

Pada periode kerjasama kali ini kebutuhan pengelolaan organisasi mendapatkan support dana dan alat kerja untuk sekretariat wilayah dan cabang, dimana sebelumnya hanya sekretariat nasional yang mendapatkan support tersebut, kecuali pada pembelian alat kerja.

Target support kesekretariatan untuk wilayah NTB adalah terkelola dan digunakannya dana kesekretariatan selama 9 bulan (Oktober 2013 – Juni 2014) dengan pertimbangan dana yang dikirimkan dari Oxfam baru diterima oleh setnas pada September 2013. Dana tersebut dapat digunakan oleh sekretariat wilayah untuk membayar sewa kantor sekretariat, biaya operasional bulanan (listrik, air, telpon/komunikasi), pembelian ATK yang digunakan sekretariat wilayah dan atau digunakan bersama dengan cabang dan balai perempuan. Selain itu juga pembelian 1 unit komputer.

Target untuk NTT adalah support kesekretariatan cabang untuk 5 paket selama 9 bulan dan pembelian 1 unit komputer. Target 5 paket dengan asumsi hingga kerjasama periode kali ini cabang yang terbentuk di NTT baru ada 5 cabang. Penggunaan biaya sekretariat cabang di NTT sama dengan target di NTB kecuali pada sewa sekretariat karena jumlah uang yang dapat dikelola tidak mencukupi untuk mensupport sewa 5 kantor sekretariat cabang.

Capaian dari target di atas sebagai berikut :

- **NTB :** menyewa kantor sekretariat baru karena kantor sekretariat lama sudah rusak dan selalu terkena banjir jika musim hujan datang. Kantor sekretariat yang baru terletak tidak jauh dari kantor sekretariat yang lama sehingga memudahkan orang untuk mencari tempatnya. Dengan ukuran yang lebih besar kantor ini direncanakan akan dimaksimalkan fungsinya sebagai tempat pelatihan bagi balai perempuan dan atau anggota yang diatur dalam kelompok-kelompok kecil. Pelatihan yang sudah direncanakan adalah pelatihan ketrampilan (menjahit, membuat aksesoris dari kain perca atau untuk peningkatan ekonomi kelompok dan keluarga. Biaya bulanan juga dibayarkan untuk keperluan rutin seperti listrik, air, telpon dan pembelian ATK sesuai kebutuhan. Pembelian 1 unit komputer disepakati dalam rapat koordinasi akan dibeli dan dihibahkan kepada cabang Dompu dengan persetujuan pengurus wilayah dan cabang yang hadir dalam rapat koordinasi. Pemilihan cabang dompu sebagai cabang pertama yang mendapat hibah komputer karena cabang Dompu cukup aktif dalam kerja pengorganisasian anggota, membangun jaringan kerja dan advokasi.
- **NTT :** biaya sekretariat bulanan cabang disepakati untuk biaya cabang Ngada, Sikka, Flores Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Dari ke-5 cabang tersebut yang memiliki kantor sekretariat khusus untuk Koalisi Perempuan Indonesia hanya cabang Sikka. Oleh karena itu penggunaan masing-masing agak berbeda. Di cabang Sikka biaya dapat digunakan untuk membayar iuran listrik sekretariat jika dibutuhkan karena sekretariat cabang memang tidak memasang listrik sendiri, namun manyambung kabel dari rumah sekretaris cabang. Di cabang-cabang lain disepakati uang operasional bulanan digunakan untuk keperluan pembelian ATK, biaya komunikasi, fotocopy, mobilitas pengurus cabang untuk urusan organisasi baik keluar maupun ke balai-balai perempuan. Pembelian 1 unit komputer disepakati untuk digunakan oleh cabang sumba tengah atau sumba barat daya. Pemilihan ini dengan pertimbangan fasilitas di Sumba

sangat terbatas dibandingkan di pulau lain, khususnya bagi pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di kedua kabupaten tersebut yang tidak memiliki fasilitas pribadi dan atau lembaga lain dimana pengurus Koalisi Perempuan Indonesia biasanya menumpang/meminjam. Namun diantara kedua cabang tersebut juga tidak ada yang mau “mengalah” untuk bergantian mendapatkan hibah komputer. Oleh karena itu kemudian diambil kesepakatan dana support dari Oxfam untuk pembelian 1 unit komputer digunakan untuk membeli 2 unit komputer. Kekurangan untuk pembelian komputer tersebut ditanggung oleh masing-masing cabang dengan menggunakan dana operasional bulanan. Artinya operasional bulanan cabang Sumba Tengah dan cabang Sumba Barat Daya akan ditanggung sendiri sepanjang bulan yang dananya masih dipotong untuk menambahi pembelian komputer. Saat ini komputer sudah diterima oleh masing-masing pengurus cabang di Sumba dan digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan dokumentasi atau data organisasi.

Catatan penting dari pengelolaan dana operasional kesekretariatan adalah pentingnya **pelatihan pembukuan atau sekaligus pelatihan manajemen keuangan** agar mereka dapat lebih tertib administrasi keuangan, dapat membuat laporan keuangan sederhana kepada anggota dan atau lembaga yang memberikan support dana.

3. Monitoring dan Evaluasi

Dalam proses pelaksanaan rencana kerja organisasi telah disepakati mekanisme monitoring dan evaluasi. Berdasarkan AD ART Koalisi Perempuan Indonesia, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala di masing-masing tingkatan kepengurusan dimana pelaku utama monev ini adalah mereka yang duduk sebagai dewan balai perempuan untuk tingkat BP, dewan kelompok kepentingan untuk tingkat cabang, presidium wilayah untuk tingkat wilayah dan presidium nasional untuk tingkat nasional.

Monitoring evaluasi di tingkat setnas yang dilakukan oleh presidium nasional dilakukan 6 bulan sekali. Sedangkan yang dilakukan sekjend ke semua staff di setnas dilakukan sebulan sekali dalam rapat pleno dan dapat sewaktu-waktu monitoring ke masing-masing pokja atau divisi di setnas. Dalam proses tersebut disampaikan laporan perkembangan organisasi, capaian, hambatan dan tantangannya agar tahap selanjutnya dapat belajar dari pengalaman yang sudah terjadi.

Monitoring dan evaluasi di NTB dan NTT oleh sekretariat nasional dilakukan dalam konteks pengelolaan program untuk mendukung agenda kerja organisasi. Target monev dilakukan masing-masing dua kali, pada

pertengahan periode program dan pada akhir periode program kerjasama dengan Oxfam. Namun karena keterbatasan dana money yang dapat dikelola Koalisi Perempuan Indonesia maka pilihan strateginya money di pertengahan pelaksanaan program dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain di masing-masing wilayah atau cabang. Target money di akhir periode program di masing-masing tempat sudah terlaksana 100%, yaitu di NTB bersama pengurus wilayah dan cabang dan di NTT bersama pengurus cabang-cabang.

Temuan dan rekomendasi dari money masing-masing sebagai berikut :

➤ **Nusa Tenggara Barat (NTB)**

- Hampir seluruh struktur di NTB memiliki banyak aktivitas organisasi, mulai dari tingkat balai perempuan maupun cabang dan wilayah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung gerak Koalisi Perempuan Indonesia baik untuk ke dalam organisasi maupun ke luar organisasi.
- Aktivitas untuk penguatan gerak di dalam organisasi antara lain dilakukan dalam bentuk pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri maupun ikut serta dalam pelatihan lembaga lain. Pelatihan yang diselenggarakan sendiri sebagian adalah pelatihan ketrampilan untuk penguatan ekonomi anggota maupun organisasi, sedangkan yang terlibat dalam pelatihan lembaga lain merupakan pelatihan yang terkait dengan kepemimpinan perempuan. Penguatan organisasi di luar dengan giatnya Koalisi Perempuan Indonesia di NTB membangun jaringan kerja dengan berbagai lembaga. Salah satunya adalah menjadi penyelenggara dialog-dialog kebangsaan bekerjasama dengan kesbangpol propinsi NTB, mengikuti pameran kerajinan nusantara yang diselenggarakan oleh dewan kerajinan daerah hingga tingkat nasional, menjadi narasumber dialog-dialog di radio local (global radio dan RRI) dengan tema-tema kepemimpinan perempuan, melanjutkan dan meluaskan gerakan istbath nikah dan pembuatan akte kelahiran anak secara komunal. Selain itu pada tahun 2014 presidium wilayah kelompok kepentingan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa juga menjadi finalis Putri Indonesia 2014 dan berhasil menjadi putri Pariwisata NTB 2014. Gelar ini digunakan sebagai peluang untuk mempromosikan pariwisata NTB berbasis masyarakat, dan keterlibatan perempuan dalam merencanakan program pariwisata yang tidak merusak lingkungan.
- Dari sejumlah aktivitas di atas salah satu hasil yang dapat dirasakan oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia di NTB adalah meningkatnya jumlah orang dan atau lembaga yang

mengenai Koalisi Perempuan Indonesia. Dampak dari hal tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia banyak dirujuk masyarakat sebagai tempat pengaduan ketika ada masalah-masalah seperti kasus buruh migrant, KDRT, termasuk juga persoalan kesulitan ekonomi yang dialami.

- Hasil pemetaan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Koalisi Perempuan Indonesia NTB baik secara keorganisasian maupun potensi kewilayahan NTB.
 - **Kekuatan:** Kader organisasi mengalami perkembangan kapasitas misalnya dalam kemampuan memfasilitasi pelatihan yang cukup beragam seperti pendidikan kader Koalisi Perempuan Indonesia, pelatihan pengorganisasian, pelatihan advokasi, pelatihan kepemimpinan, pelatihan untuk caleg dan aleg, pelatihan mengenai isu-isu khusus seperti buruh migrant, layanan public, kesehatan reproduksi, kedarasan gender dan pelatihan ketrampilan-ketrampilan (life skill). Jaringan kerja juga sudah berkembang mulai dari pemerintah daerah (kabupaten/kota), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, NGO di NTB hingga NGO Internasional.
 - Secara kewilayahan NTB merupakan daerah potensi pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia timur dimana kekayaan alam yang dimiliki bukan hanya tambang tetapi beragam seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan kelautan. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk turut serta membangun ekonomi daerah dan menguatkan ekonomi perempuan melalui kerja-kerja khusus berbasis kelompok kepentingan.
 - Kelemahan : Kelemahan Koalisi Perempuan Indonesia NTB yang ditemukan dalam monev adalah: 1) Menurunnya tingkat kedisiplinan pengurus dan atau staff (wilayah) dalam melakukan pendokumentasian proses dan hasil kerja organisasi. 2). Rencana kerja yang disusun seringkali diabaikan apalagi jika sedang ada satu kegiatan yang ditangani serius seperti pemilu legislative 2014 yang membuat beberapa rencana kerja lainnya terabaikan. 3). Lemahnya manajemen di sekretariat wilayah. Dalam bulan-bulan terakhir periode kerjasama ini karena tidak adanya staff di sekretariat wilayah yang fulltime, hanya ada 1 orang staff keuangan yang bekerja secara sukarela. Hal ini

mengakibatkan beberapa kerja dan komunikasi antara cabang dan sekretariat Nasional, mengalami hambatan.

- Rekomendasi dari monitoring dan evaluasi pertengahan tahun 2014 sekaligus akhir program kerjasama dengan Oxfam periode ini adalah:
 - pentingnya rekrutmen staff sekretariat wilayah yang bekerja dengan deskripsi dan pembagian tugas yang jelas,
 - upaya peningkatan kapasitas pengurus dan staff dalam mengelola kelembagaan organisasi,
 - adanya rapat koordinasi secara rutin baik di tingkat pengurus wilayah, pengurus cabang dan balai perempuan maupun antar struktur tersebut.
 - Perbaikan sistem pendokumentasian rencana, proses dan hasil kerja organisasi.
 - Penguatan komunikasi dan Informasi di tingkat internal kepada anggota, mengenai makna dukungan dana dari pihak ketiga bagi organisasi. Karena sebagai organisasi massa tentunya Koalisi Perempuan Indonesia harus lebih mengutamakan pendanaan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri baik dalam bentuk iuran anggota, sumbangan maupun usaha-usaha organisasi yang sah dan tidak mengikat.

➤ **Nusa Tenggara Timur (NTT)**

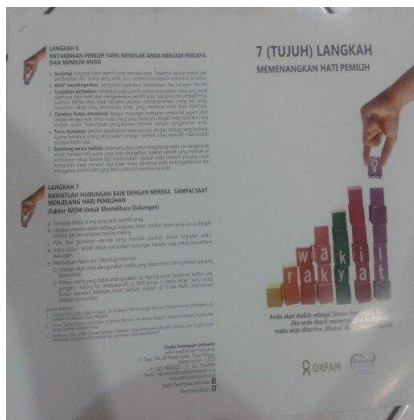
Monitoring dan evaluasi di akhir program periode ini dilakukan pada Juni 2014 di Kupang dengan fasilitator Diah Wara Restiyati staff litbang Setnas Koalisi Perempuan Indonesia dan Bayu Sustiwi staff pengelola program Oxfam setnas Koalisi Perempuan Indonesia. Monev diikuti oleh pengurus cabang dan balai perempuan yang ada di NTT.

Dari paparan kondisi masing-masing cabang dan balai perempuan forum dan fasilitator monev merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- Pentingnya peningkatan pengetahuan perKPIan melalui PKD di semua balai perempuan terutama mereka yang baru dan belum pernah melewati pendidikan kader dasar.
- Merespon isu dan kebijakan saat ini, Koalisi Perempuan Indonesia harus melakukan sosialisasi UU Desa.
- Melihat banyaknya persoalan KDRT yang dilaporkan ke balai perempuan dan atau cabang maka penting juga dilakukan sosialisasi UU PKDRT dan ketrampilan dalam penanganan kasus KDRT dan atau kekerasan terhadap perempuan (KTP).

- Perlunya diselenggarakan Pelatihan Pengorganisasian untuk Pulau Timor (Timor Barat) karena jarak dan letak geografis yang jauh antar Balai Perempuan. Ketidakaktifan peserta pelatihan CO di Kabupaten TTS sehingga kegiatan vakum.
- Pentingnya mengembangkan media komunikasi alternatif yang dapat digunakan anggota dan pengurus untuk berbagi informasi dan pengalaman. Salah satu alternatif adalah menggunakan media sosial. Namun perlu dilakukan pelatihan bagaimana menggunakan media sosial seperti FB untuk berjejaring dan memberitakan hal-hal ke publik dan atau internal organisasi (dalam grup).
- Pentingnya dilakukan pertemuan lintas balai perempuan untuk pertukaran informasi dan atau pertemuan lintas cabang untuk memberikan informasi dan motivasi dalam mengelola dan menghidupkan organisasi.
- Pentingnya pelatihan Manajemen organisasi terutama dalam soal administrasi keuangan, menulidlaporan, membuat dokumentasi kegiatan. Dari kebutuhan ini disepakati yang pertama adalah pelatihan menulis laporan.

4. Pencetakan dan distribusi KIE



Bahan bacaan dan informasi menjadi salah satu sarana penting dalam menyebarkan informasi yang benar, aturan dan atau sikap organisasi agar dapat dipahami dan dijalankan oleh anggota maupun masyarakat yang mendukung ide tersebut. Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa dimana anggotanya tersebar di lebih dari 25 propinsi penting memilih dan menggunakan cara-cara distribusi informasi

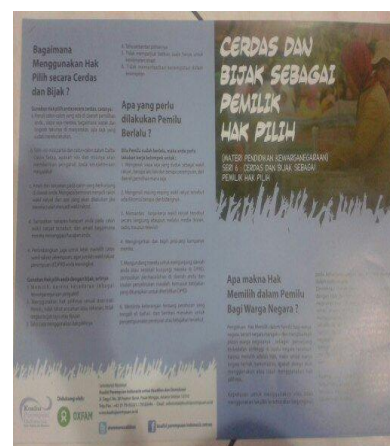
yang efektif dan dapat menjangkau secara luas. Salah satu pilihan kami adalah pencetakan leaflet, booklet, factsheet, majalah, website dan penggunaan media sosial.

Dalam konteks kerjasama dengan Oxfam periode kali ini ditargetkan untuk pencetakan KIE yang terkait dengan perlindungan sosial. KIE perlindungan social berisi pengetahuan dasar mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan social, kluster-kluster program perlindungan social yang dibuat oleh pemerintah, perlindungan social sebagai hak warga Negara. Capaian dari rencana ini adalah adanya draft untuk bahan pencetakan KIE. Pencetakannya sendiri belum dilakukan karena draft yang disusun juga terus berkembang dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan kebijakan, hasil penelitian dan assessment Koalisi Perempuan Indonesia mengenai implementasi

program perlindungan social, penyusunan konsep perlindungan social menurut Koalisi Perempuan Indonesia yang baru selesai dilakukan ketika program periode ini telah berakhir. Oleh karena itu pencetakan dan distribusi KIE perlindungan social direncanakan akan dilakukan pada periode kerjasama berikutnya.

Bahan bacaan penting lain yang dicetak dengan dana dukungan Oxfam periode kali ini adalah leaflet “7 langkah memenangkan hati pemilih” versi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai salah satu bahan bacaan peserta pelatihan Manajemen Kampanye dan didistribusikan juga kepada caleg perempuan yang tidak mengikuti pelatihan Koalisi Perempuan Indonesia. Selain itu juga dicetak bahan-bahan bacaan seri pemilu dan demokrasi yaitu (1) demokrasi dan pemilu (2) pemilu dan pemilih (3) cerdas dan bijak sebagai pemilik hak pilih (4) penyelenggara pemilu (5) apa dan mengapa demokrasi (6) keterwakilan perempuan di parlemen. Selain seri bacaan juga dicetak T-Shirt untuk caleg perempuan yang mengikuti pelatihan di NTB dan NTT dengan tagline “Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi” dan “Perempuan dan Pemilu ; Mewujudkan Keterwakilan Politik Perempuan”.

Pada penghujung kerjasama periode kali ini setnas melihat perkembangan dan tingginya antusiasme perempuan untuk bergabung sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Salah satu alat informasi yang penting bagi mereka yang akan bergabung sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia adalah leaflet profil organisasi dan formulir pendaftaran calon anggota. Oleh karena itu setnas juga mencetak leaflet dan formulir tersebut menggunakan dana program support Oxfam untuk mendukung kerja-kerja organisasi. Dukungan Oxfam juga digunakan untuk mencetak kertas surat berkop Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan administrasi.



BAB III

KISAH SUKSES

Dalam Program ini, cukup banyak keberhasilan yang dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat. Namun diantara keberhasilan tersebut, terdapat 2 contoh keberhasilan yang menonjol yaitu :

1. Koperasi Perempuan Sejahtera dan Koperasi Wisata Cipta Pesona di Cabang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
2. Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Cabang Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur.

Kedua contoh itu dilaporkan secara khusus sebagai Kisah Sukses, karena merupakan satu terobosan untuk mengatasi beberapa masalah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas

1. Kisah Sukses Membangun Koperasi Perempuan Sejahtera dan Koperasi Wisata Cipta Pesona- Cabang Lombok Barat –Nusa Tenggara Timur

Sebagaimana telah dilaporkan dalam periode lalu, salah satu alat pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia yang dikembangkan di cabang Lombok Barat NTB adalah mendorong dan mengelola berdirinya koperasi. Dalam periode lalu sudah berhasil berdiri koperasi perempuan sejahtera Lombok Barat yang telah mendapatkan ijin sah (berbadan hukum). Perjalanan cabang Lombok Barat kemudian banyak bergelut dalam soal penguatan ekonomi dan mendapat kepercayaan dari berbagai pihak termasuk pemda Lombok Barat bahkan dinas koperasi Propinsi NTB.



Setelah mengembangkan koperasi dan dikenal oleh masyarakat, Koalisi Perempuan Indonesia menjadi tempat pengaduan berbagai persoalan masyarakat. Antara lain adalah terganggunya warga desa Gubug Baru yang ada di kecamatan Kediri karena di desa mereka digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Gangguan timbul karena sampah dibuang di dekat pemukiman warga, tentu saja bau menyengat dan berbagai penyakit yang timbul kemudian menyerang mereka. Kemudian juga

potensi timbulnya konflik horizontal karena banyaknya pemulung yang datang untuk mengais rejeki dari tempat sampah. Warga setempat sering merasa curiga dengan kehadiran pemulung yang dikhawatirkan juga melakukan tindak kriminal pencurian. Apalagi sebagian dari mereka kemudian tinggal di sana.

Dari persoalan ini muncul ide mengajak warga untuk memanfaatkan sampah dengan melakukan daur ulang. Sampah basah didaur ulang menjadi kompos dan sampah kering didaur ulang menjadi berbagai barang kerajinan. Namun mendaur ulang sampah saja belum menyelesaikan persoalan karena warga sebenarnya menuntut agar tempat pembuangan sampah bukan di desa mereka atau jika di desa Gubug Baru juga harus yang jauh dari pemukiman penduduk. Koalisi Perempuan Indonesia kemudian berupaya melakukan lobby kepada pemerintah daerah Lombok Barat mengenai hal tersebut. Upaya lobby ini disertai pula dengan upaya lain yaitu menjadikan lahan yang saat ini menjadi tempat sampah disulap menjadi kebun bunga dan buah. Dengan demikian harapannya warga mendapatkan manfaat ekonomi dan pemerintah daerah juga memperhatikan kesungguhan warga dalam menjaga lingkungan.

Berkembang dari ide menyulap tempat sampah ini adalah membuat paket wisata desa dengan menjual kerajinan, pemandangan dan potensi-potensi lain. Untuk memudahkan pengelolaan dan agar masyarakat juga merasa memiliki paket wisata tersebut maka dibentuklah koperasi wisata. Koperasi ini beranggotakan anggota koperasi mandiri ditambah dengan warga di Gubug Baru.

Koperasi wisata menjual 3 paket wisatadengan variasi harga dan fasilitas sebagai berikut :



Paket 1, harga normal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan fasilitas tamu mendapatkan 1 buah topi anyaman daun lontar yang dapat langsung digunakan untuk mengantisipasi cuaca panas atau gerimis, naik cidomo dari kantor koperasi (desa lelede) menyusuri desa lelede melihat pemandangan sawah, melewati pasar seni, masjid kembar desa banyumulek hingga ke kebun bunga dan buah di desa Gubung Baru dan kembali ke lelede, mendapatkan snack dan minuman segar dari pangan local (ubi/talas/pisang/kacang dan kelapa muda).

Paket 2, harga normal Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dengan fasilitas topi, naik cidomo menyusur dari desa lelede, banyumulek dan gubug baru sampai kembali lagi ke lelede, mendapatkan snack dan minuman segar, memperoleh kesempatan belajar membuat keramik di desa gubug baru dan singgah di pasar seni desa lelede.

Paket 3, harga normal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Paket ini berisi sama dengan paket 2 plus makan siang di desa gubug baru dengan makanan segar yang dipetik langsung dari kebun setempat, dimasak dan disajikan oleh kelompok perempuan desa Gubug Baru. Selain itu juga keramik yang sudah dibuat dapat dibakar dan dibawa pulang jika tamu menginginkan.

Sepanjang persiapan hingga laporan ini ditulis, koperasi wisata sudah mendapatkan 11 kunjungan untuk mencoba paket-paket tersebut. kunjungan antara lain berasal dari dinas pendidikan propinsi dan Lombok barat. Mereka melakukan kunjungan sekaligus untuk

membicarakan relokasi SMK 1 Lombok barat yang terlalu dekat dengan bekas tempat sampah dan peternakan sapi milik warga.



Persiapan “menjual” desa wisata belum selesai karena kelompok masih terus berbenah menata kebun buah dan bunga, menata dan ujicoba menu makanan yang akan dijual, menata kawasan di Gubug Baru dengan rencana memindahkan kandang sapi milik warga agar memudahkan pengaturan kotorannya untuk diolah menjadi biogas. Kerja mewujudkan desa wisata Koalisi Perempuan Indonesia Lombok Barat ini juga didukung oleh GIZ yang akan memfasilitasi beberapa pelatihan ketrampilan kelompok seperti pembuatan dan pengelolaan biogas, pengolahan pangan lokal dan daur ulang sampah.

Prestasi cabang Lombok Barat melalui program ini berarti juga mereka telah menyumbang pada penyelesaian persoalan lingkungan yang menjadi salah satu nilai organisasi, menyumbang pada penyelesaian persoalan ekonomi dalam skala desa yang harapannya akan berdampak pada tingkat kabupaten karena mendatangkan wisatawan ke Lombok Barat. Selain itu juga mendorong perempuan untuk berorganisasi dan bekerja sama dalam tim. Berdasar dari salah satu persoalan yang ditemukan oleh cabang Lombok Barat, membangun dan mewujudkan desa wisata ini juga akan menyumbang pada upaya mencegah konflik horizontal yang mungkin muncul di masyarakat akibat dari pembuangan sampah yang mengganggu warga dan munculnya kelompok pemulung yang dicurigai berpotensi sebagai pengganggu keamanan kampung. Artinya Koalisi Perempuan Indonesia cabang Lombok Barat juga menyumbang pada upaya mewujudkan situasi damai dan nyaman di tempat tersebut.

2. Kisah Sukses PAUD “MIMI” balai perempuan Weekokora kecamatan Wewewa Tengah- Cabang Sumba Barat Daya – NTT

MIMI dalam bahasa wewewa artinya siap atau matang. PAUD ini diberi nama PAUD MIMI dengan arti ketika akan dibuka sudah dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Kecamatan Wewewa Tengah merupakan kecamatan pemekaran yang baru diresmikan menjadi kecamatan sendiri pada tahun 2012. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa yaitu Weekokora, Kalingngara, Lombu, Kanelu, Weerame, Tanggaba, Weepatando, Bolora, Ombarade dan Ekapata. Gerak Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sumba Barat Daya banyak dimulai dan dikonsolidasikan dari balai perempuan ini antara lain karena sekretaris cabang SBD berdomisili di desa Weekokora. Salah satu capaian penting dalam periode ini adalah berdirinya tempat pendidikan anak usia dini. Ide tersebut muncul dari keprihatinan pengurus cabang dan balai perempuan setempat melihat banyaknya anak-anak usia dini yang setiap hari hanya bermain di sekitar rumah atau kebun atau di tempat-tempat lain dimana orangtua dan anak yang lebih besar beraktivitas. Mereka khawatir juga karena di desa Weekokora juga terdapat jalan raya yang menjadi lintasan kendaraan antar kabupaten dengan kendaraan yang sering *ngebut* di jalanan. Kondisi tersebut tentu membahayakan anak-anak yang kadang tidak terlalu memperhatikan situasi jalan raya.



Keprihatinan sekcab SBD ini disampaikan kepada setnas melalui Koordinator Pokja Penguatan Organisasi yang berkunjung ke rumahnya pada 22 maret 2014 bersama direktur Yayasan Sosial Donders SBD. Dari pembicaraan ini muncul ide untuk menyelenggarakan kegiatan belajar dan bermain anak atau sekaligus dikembangkan menjadi PAUD. Gagasan ini didukung oleh YSD dengan menawarkan untuk menyediakan modul PAUD yang dapat dipelajari pengurus dan kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk persiapan.



Pada tanggal 27 Maret 2014 PAUD dilakukan pertemuan pertama antara orangtua murid dengan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia cabang SBD dan relawan yang akan menjadi pengajar di PAUD tersebut. Pada pertemuan tersebut anak-anak yang akan menjadi murid di PAUD juga sudah ikut datang dan mulai perkenalan. Jumlah anak yang datang pada pertemuan pertama berjumlah sekitar 60 anak. Dalam pertemuan orangtua murid disepakati bahwa anak-anak akan belajar bersama guru relawan dari Koalisi Perempuan Indonesia yang juga merupakan anggota balai perempuan Weekokora seminggu 2 kali pada hari senin dan kamis. Alat-alat belajar dipersilahkan

orangtua membekali anak-anaknya dengan buku dan alat tulis. Fasilitas yang tersedia di PAUD hanya ruang sederhana di samping rumah sekcab dengan alas terpal dan spanduk-spanduk plastic bekas kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia, ada 1 buah whiteboard dan 1 buah papan tulis hitam yang akan digunakan dalam proses belajar-mengajar, beberapa poster untuk bantu belajar seperti poster huruf, gambar hewan-hewan, gambar tumbuh-tumbuhan. Pada pertemuan kedua anak yang hadir melebihi jumlah pertemuan pertama yaitu hingga 88 anak. Jumlah ini membuat kewalahan relawan pengajar yang hanya 3 orang. Karena itu kemudian keesokan harinya diadakan rapat pengurus cabang dengan relawan guru dan perwakilan orangtua murid yang menyepakati ada pembagian usia dan jam belajar. Tujuannya agar belajar anak lebih efektif dan guru-guru juga lebih konsentrasi memperhatikan perkembangan satu-persatu anak.

Awalnya relawan guru belajar cara mengajar, materi yang diajarkan dalam PAUD dan metode dari modul PAUD yang disumbangkan oleh Yayasan Sosial Donders (YSD) SBD. Selain itu setelah Koalisi Perempuan Indonesia cabang SBD mendapat hibah computer dan membeli modem dari support dana program Oxfam, guru-guru juga rajin mencari bahan-



bahan ajar dari internet. Tidak jarang mereka juga mengajak berdiskusi sesama anggota Koalisi Perempuan Indonesia melalui facebook. Demi kemajuan anak-anak didik, sekcab SBD juga mengunjungi dinas pendidikan kabupaten SBD untuk menanyakan apakah mereka bisa mendapatkan support bahan ajar dan atau alat-alat untuk anak-anak. Dinas pendidikan menyambut baik kehadiran PAUD MIMI di Weekokora karena diakui mereka memang belum memiliki program khusus atau membangun sarana pendidikan tersebut di sana atau desa terdekatnya.

Tindak lanjut dari kunjungan tersebut adalah hadirnya staff dinas pendidikan kabupaten SBD untuk meninjau langsung PAUD MIMI dan proses belajar-mengajar yang berlangsung di sana. Hasil dari kunjungan dinas pendidikan, saat ini ijin operasi PAUD MIMI sedang diproses. Pekerjaan rumah bagi Koalisi Perempuan Indonesia adalah peningkatan kapasitas relawan pengajar, membangun dan memperkuat jaringan kerja untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasarana alat belajar-mengajar, dukungan financial bagi operasional PAUD.

Hingga laporan ini ditulis, murid yang tetap mengikuti belajar mengajar di PAUD berjumlah 87 anak dan ditemani oleh relawan pengajar sebanyak 4 orang. PAUD MIMI ini menginspirasi pengurus dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia di balai perempuan Weelimbu dan Pogotena (SBD) yang juga mengalami persoalan yang sama

yaitu banyaknya anak-anak usia dini yang tidak dapat mengakses fasilitas belajar-mengajar karena jauh dari desa tersebut.

Dengan membangun dan mengelola PAUD ini, cabang Sumba Barat Daya menyumbang pada upaya terpenuhinya hak atas pendidikan, hak tumbuh-kembang, bermain dan berekspresi bagi anak-anak. Selain itu juga memberikan peluang untuk berkembang dan mendapatkan informasi bagi anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang terlibat dalam pengelolaan PAUD, baik sebagai guru pengajar maupun sebagai orangtua murid yang diajak berdiskusi dan terlibat dalam proses-proses perbaikan penyelenggaraan PAUD.

BAB IV

ANALISA CAPAIAN DAN KEBERHASILAN

1. Perencanaan VS Program

Secara umum dari seluruh pelaksanaan Program Memperkuat Peran Dan Posisi Perempuan Untuk Mempercepat Terwujudnya Keadilan Gender, Demokrasi Dan Perdamaian di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan beberapa Kemajuan sebagai Berikut :

Pengorganisasian

Dalam Pengorganisasian ditemukan kemajuan sebagai berikut :

- Pertambahan jumlah anggota sebanyak 1110 perempuan , yaitu di NTT 690 dan 420 di NTB..
- Perambahan struktur organisasi Koalisi Perempuan yaitu :
 - Bertambahnya Balai Perempuan di NTT sebanyak 23 BP , sehingga jumlah Balai Perempuan di NTT kini mencapai 100 Balai Perempuan
 - Bertambahnya Balai Perempuan di NTB sebanyak 14 BP , sehingga jumlah Balai Perempuan di NTB kini mencapai 84 Balai Perempuan
 - Bertambahnya Cabang di NTT yaitu terbentuknya 2 cabang baru di NTT sehingga Cabang Koalisi Perempuan Indonesia di NTT kini berjumlah 7 Cabang
 - Bertambahnya Cabang di NTB yaitu terbentuknya 1 cabang baru di NTB sehingga Cabang Koalisi Perempuan Indonesia di NTB kini berjumlah 9 Cabang
- Tumbuhnya inovasi baru dalam komunitas Balai Perempuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi . Inovasi tersebut antara lain :
 - Pendirian Koperasi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh anggota Koalisi Perempuan. Terdapat 11 Koperasi yang telah terbentuk antara lain di 4 (NTT) dan di 7 (NTB)
Didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Saat ini sudah dibentuk 2 PAUD di Cabang Sumba Barat Daya, satu PAUD telah diresmikan, sedang satu lagi dalam Proses persiapan peresmian. Dengan membangun dan mengelola PAUD ini, cabang Sumba Barat Daya menyumbang pada upaya terpenuhinya hak atas pendidikan, hak tumbuh-kembang, bermain dan berekspresi bagi anak-anak. Selain itu juga memberikan peluang untuk berkembang dan mendapatkan informasi bagi anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang terlibat dalam pengelolaan PAUD, baik sebagai guru pengajar maupun sebagai orangtua murid yang diajak berdiskusi dan terlibat dalam proses-proses perbaikan penyelenggaraan PAUD.
 - Mengaktifkan kembali kerajinan Tenun berbasis bahan-bahan alam, untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan melestarikan budaya lokal setempat

- Pelatihan pertanian organik untuk mengatasi kerawanan pangan. Pelatihan pertanian organik ini telah dilaksanakan di 16 desa.
 - Pemulihan lingkungan, untuk mengatasi masalah kesehatan lingkungan terutama yang disebabkan oleh sampah dan limbah. Pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk daur ulang sampah dan pengembangan Desa Wisata. Sedangkan pengelolaan limbah ternak, dilakukan dengan pengelolaan limbah ternak dan pengelolaan biogas untuk memenuhi kebutuhan energi
- Meluasnya kegiatan-kegiatan dari target yang direncanakan :
- pertemuan caleg perempuan di tingkat kabupaten yang semula hanya direncanakan di 2 kabupaten di NTT ternyata terlaksana juga terlaksana di kabupaten lain baik NTT maupun NTB,
 - Pembelian alat kerja berupa komputer untuk NTB dan NTT lebih dari target karena ada inisiatif baru di NTT, untuk menambah jumlah pembelian komputer dengan tabungan yang mereka miliki.

Rencana yang belum terlaksana dengan baik dan membutuhkan perhatian ke depan adalah pengelolaan dana operasional sekretariat cabang di NTT, membangun jejaring caleg perempuan harus lebih ditingkatkan secara kualitas maupun keragaman cara untuk mempertemukan dan membangun komitmen para caleg, pencetak KIE tentang perlindungan sosial belum dilakukan karena bahan-bahan yang belum siap (masih melihat perkembangan kebijakan dan konsep internal Koalisi Perempuan Indonesia).

☀ Reformasi Kebijakan Publik & Partisipasi Masyarakat

Advokasi untuk perubahan kebijakan publik dilakukan dalam bentuk, advokasi untuk kemudahan perijinan dalam pembentukan koperasi, advokasi terkait program-program pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan, terutama buta huruf, pendidikan bagi anak usia dini, pengetasan kemiskinan dan pengawasan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (BPJS), monitoring kebijakan KPU dalam pendaftaran Calon Legislatif, dan seluruh proses pemilu legislatif.

Advokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Manusak yang dilakukan oleh pengurus dan anggota BP Raknamo. Mereka memasukkan pengaduan kepada OMBUDSMAN tentang pengelolaan Dana Bos yang dianggap tidak sesuai dengan JUKNIS pengelolaan Dana Bos

Sedangkan partisipasi masyarakat yang paling menonjol dilakukan dalam bentuk keikutsertaan kader Koalisi Perempuan Indonesia sebagai calon anggota legislatif, sebagai Relawan Demokrasi. dan pengawalan suara hasil pemungutan suara.

☀ REFLEKSI Repon Koalisi Perempuan Indonesia terhadap Pemilu.

Pada pemilihan Umum legislatif, terdapat 37 anggota Koalisi Perempuan Indonesia di NTT yang menjadi calon anggota legislatif, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sedangkan di NTB terdapat 50 anggota yang menjadi calon anggota Legislatif, di tingkat Nasional, ditingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. orang .

Dari jumlah tersebut ada 2 anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang berhasil menjadi anggota DPRD di NTT dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPRD di NTB ada 2 orang, 1 orang menjadi anggota DPRD Provinsi dan 1 orang anggota DPRD Lombok Tengah.

Bagi Koalisi Perempuan Indonesia, keberanian mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ini merupakan kemajuan besar dalam pendidikan kepemimpinan. Setidaknya dari pencalonan tersebut, menunjukkan adanya perubahan pikiran tentang kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dan menduduki posisi pengambilan keputusan.

Perolehan kursi caleg perempuan yang di NTB dan NTT sebagai berikut :

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) terpilih dari dapil NTB terdapat 2 anggota DPD perempuan dari 4 anggota DPD yaitu Baiq Ratu Ganefi dan Hj. Robiatul Adawiyah. Sementara anggota DPD RI terpilih di dapil NTT 4 orang semua laki-laki.

Salah satu dari ke-4 orang tersebut adalah Hj. Wartiyah yang merupakan salah satu caleg yang mendapat dukungan informasi, bahan bacaan dan relawan anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

Jumlah Anggota DPRD Propinsi NTB mengalami kenaikan dari 55 menjadi 65 orang. Sedangkan hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum pada 9 April 2014 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD Propinsi perempuan justru mengalami penurunan dari 6, menjadi 4 perempuan.

Menurun dari 6 menjadi 4 tersebut antara lain disebabkan oleh kencangnya politik uang yang mengakibatkan rontoknya dukungan suara kepada calon anggota legislatif perempuan. Sebagai organisasi yang berpegang teguh pada pemilu bersih, Koalisi Perempuan meminta kepada anggotanya dan mengkampanyekan agar calon anggota legislatif tidak menggunakan politik uang. Sebab lain dari rendahnya keterwakilan perempuan adalah, banyaknya caleg perempuan baik dari parpol yang sama ataupun berbeda di daerah pemilihan yang sama sehingga suara untuk perempuan banyak terbagi dan tidak mencukupi untuk menang sebagai anggota legislatif. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam keterpilihan calon anggota legislatif perempuan adalah preferensi pemilih yang cenderung memilih calon anggota legislatif berdasarkan kesamaan suku dan agama.

Kontribusi Koalisi Perempuan Indonesia pada terpilihnya perempuan di NTB adalah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pemilih, tim relawan yang bekerja mengkampanyekan keterwakilan politik perempuan, Keterlibatan kader Koalisi Perempuan Indonesia sebagai relawan demokrasi KPUD dan panwaslu, dan keterlibatan anggota Koalisi Perempuan sebagai relawan saksi caleg perempuan. Namun sumbangan Koalisi Perempuan Indonesia dalam bentuk pelatihan bagi calon anggota legislatif perempuan Indonesia, belum mampu menyumbangkan peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan.

Jumlah Anggota DPRD Propinsi NTT adalah 60 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 6 perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD : Pdt. Adriana R. Kahi Awa Kossi (Golkar),

Kristien Samiyati Pati (Nasdem), Yeni Veronika (PAN), Kristofora Bantang (PDI Perjuangan), Angela Mercy Piwung (Hanura), Aleta Kornelia Baun (PKB). Dari ke-6 orang tersebut tidak ada yang mengikuti pelatihan caleg di Koalisi Perempuan Indonesia. Aleta Kornelia Baun pernah mengikuti pelatihan pengorganisasian yang diselenggarakan oleh Oxfam Australia dan difasilitasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia

Jumlah anggota DPRD Provinsi tersebut mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yaitu hanya 4 orang perempuan.

Meskipun terjadi kenaikan anggota legislatif dari 4 menjadi 6 atau dari 7% menjadi 10 % namun keterwakilan perempuan ini masih jauh lebih rendah dari target gerakan perempuan untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan. Gerakan perempuan di NTT sangat menyadari sulitnya meningkatkan keterwakilan perempuan di propinsi maupun di Kabupaten. Mengingat masih kuatnya faktor budaya yang menjadi perintang. Gerakan perempuan NTT menargetkan 15% keterwakilan Perempuan di parlemen. Namun target ini pun belum dapat di capai.

Rendahnya keterwakilan perempuan di NTT terutama disebabkan oleh faktor budaya dimana sebagian besar pemilih perempuan belum dapat menjadi pemilih yang mandiri. Pengambilan keputusan dalam menentukan calon legislatif mana yang akan dipilih, masih dipengaruhi oleh suami, keluarga besar dan kesepakatan dalam suku atau ikatan agama. Selain persoalan rintangan budaya, tingginya jumlah perempuan yang buta huruf, juga menjadi rintangan bagi perempuan untuk memperoleh informasi.

Kontribusi Koalisi Perempuan Indonesia pada terpilihnya perempuan di NTT adalah dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan bagi Calon anggota Legislatif, pendidikan pemilih, tim relawan yang bekerja mengkampanyekan keterwakilan politik perempuan melalui media elektronik (Televisi dan Radio) dan bahan tulisan, Keterlibatan kader Koalisi Perempuan Indonesia sebagai relawan demokrasi KPUD dan panwaslu, dan keterlibatan anggota Koalisi Perempuan sebagai relawan saksi caleg perempuan..

Peserta pelatihan caleg yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di NTT melahirkan 1 orang anggota DPRD yaitu Christina Lali Ndelo (Golkar) untuk DPRD Kabupaten Sumba Barat. Sementara yang *nyaris* menjadi anggota DPRD ada 2 orang yaitu Since Unbanunbek (PAN) di DPRD kabupaten TTS dan Margaretha Pujiharwanti (PDI Perjuangan) di DPRD Propinsi NTT.

Kedua calon anggota legislatif tersebut hampir terpilih sebagai anggota DPRD dengan selisih suara yang sangat tipis dengan anggota terpilih (mama Since). Sedangkan Margaretha hampir terpilih sebagai anggota DPRD, namun karena terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara di beberapa KPPS di kecamatan wewewa tengah Sumba Barat Daya, yang bersangkutan tidak berhasil jadi anggota legislatif. Kesalahan penjumlahan ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang (KPUD, Panwaslu, pengurus PDI Perjuangan) namun suara yang diperolehnya kembali tetap lebih kecil dibandingkan dengan suara yang diperoleh berdasarkan salinan C1 yang dimiliki saksi dan tetap tidak mencukupi untuk memperoleh kursi DPRD propinsi.

Keterlibatan anggota Koalisi Perempuan dalam Pemilihan Umum, baik sebagai calon anggota legislatif, Relawan Demokrasi maupun Saksi, memberikan kontribusi pada peningkatan kepemimpinan perempuan. Melalui kegiatan tersebut anggota Koalisi Perempuan Indonesia dapat memperluas jejaring kerja untuk bekerja sama, memperkuat kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu, menghadapi berbagai pihak, mengelola konflik serta memperkuat nilai dan etika kepemimpinan perempuan.

Dari hasil refleksi bersama calon anggota legislatif, diperoleh kesimpulan bahwa, meskipun hampir sebagian besar kecewa karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif, namun semuanya sepakat bahwa mereka memperoleh banyak sekali pembelajaran dari seluruh proses pemilihan umum yang mereka lalui. Mereka juga semakin memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak.

2. Analisis Capaian

Apa yang telah dicapai dalam periode kali ini didukung oleh beberapa faktor seperti momentum yang tepat yaitu persiapan dan pelaksanaan pemilu legislatif 2014 yang mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan kepemiluan mendapat respon positif baik dari anggota, caleg, parpol, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pemerintah terkait dan media massa.

Pertemuan-pertemuan balai perempuan dan cabang dapat terlaksana dengan kesukarelawanan dan kemandirian yang lebih tinggi karena anggota sudah merasakan manfaat bergabung dalam organisasi dan pihak-pihak lain juga sudah melihat gerakan yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia memang bertujuan baik dan bermanfaat, oleh karena itu mereka mendukungnya.

Konferensi cabang di Sumba Timur dan kota Kupang (NTT), kabupaten Sumbawa Barat (NTB) untuk pertama kalinya dapat dilakukan karena dorongan besar dari dalam organisasi yaitu semangat anggota dan balai-balai perempuan untuk segera memiliki struktur di tingkat cabang. Dengan adanya kepengurusan di tingkat cabang ini mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki pengurus untuk mengkoordinir kerja bersama di tingkat kabupaten baik dalam konteks pengorganisasian, advokasi maupun berjejaring. Sedangkan konferensi cabang kabupaten Kupang dan Sumba Barat (NTT) yang belum berhasil dilakukan pada periode ini karena balai-balai perempuan masih merasa perlu memantapkan diri bekerja di balai masing-masing terlebih dahulu. Selain itu di Sumba Barat memang ada hambatan geografis dan budaya antar balai perempuan yang berbeda dan jaraknya cukup berjauhan.

3. Refleksi Pemilihan Strategi

Sebagaimana digunakan dalam periode lalu, pengorganisasian terbukti mampu membangun kesadaran kritis perempuan sehingga mereka dapat memutuskan apa yang akan dilakukan baik secara personal maupun komunal. Strategi ini sangat berbeda dengan mobilisasi dimana ketika orang hanya dimobilisasi maka organisasi yang dibangun juga rapuh dan mudah runtuh.

Pengorganisasian yang menghasilkan anggota yang militan dan organisasi yang solid mensyaratkan adanya kader yang sabar, tekun dan jujur dalam melakukan proses ini. Artinya dia bukan kader yang mengejar capaian angka-angka semata seperti jumlah anggota yang cepat bertambah atau hanya melakukan *kunjungan seolah-olah* sehingga dia tidak memahami secara jelas apa persoalan masyarakat dan apa yang dapat dilakukan bersama. Syarat ini tidak sulit dipenuhi jika semua kader meyakini apa yang dicita-citakan organisasi adalah juga cita-cita mereka.

4. Pembelajaran dan Tantangan

a. Pembelajaran

Peningkatan kapasitas yang terus-menerus sangat penting dan akan membantu organisasi dalam bergerak melakukan pengorganisasian dan advokasi maupun dalam mengelola organisasi (manajemen organisasi). Penambahan jumlah kader yang mampu menjadi CO, mampu melakukan tahapan-tahapan advokasi, mampu menjadi fasilitator pelatihan, menjadi narasumber isu-isu perempuan terbukti membuat Koalisi Perempuan Indonesia semakin banyak *dilirik* dan diperhitungkan dalam masyarakat.

b. Tantangan satu tahun ke depan

Setelah berlalu momentum pemilu legislatif dan pemilu presiden, kita akan banyak menghadapi pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Keterwakilan politim perempuan dan pendidikan pemilih yang cerdas bukan hanya untuk pemiliha di tingkat nasional tetapi juga tingkat daerah. Koalisi Perempuan Indonesia secara organisasi memang belum pernah menyiapkan kader untuk maju dalam pemilihan kepada daerah. Namun ke depan terutama tahun 2015 dimana akan banyak pilkada, penting dipikirkan bagaimana strategi organisasi dalam mendorong lahirnya kepala-kepala daerah yang berpihak pada perempuan dan masyarakat terpinggir.

Lahirnya kebijakan-kebijakan baru di tingkat nasional yang akan berlaku di seluruh Indonesia juga penting untuk dicermati dan organisasi harus segera menentukan sikap. Misalnya dengan UU Desa, UU Ormas dan program perlindungan sosial yang merupakan hak seluruh warga negara.

Potensi-potensi konflik horisontal dengan berbagai latar belakang seperti kemungkinan dampak dari pemilu presiden 2014 juga harus diwaspadai dan diantisipasi. Harapannya perempuan – Koalisi Perempuan Indonesia – dapat menjadi agen perdamaian di berbagai tempat dan lini.

c. Langkah-langkah ke depan

Sebagaimana direkomendasikan dalam pertemuan monev NTB dan NTT, pertemuan refleksi caleg perempuan maupun catatan lain perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan politik, pelatihan ketrampilan

(membuat laporan, pengelolaan keuangan dll), pelatihan dan diskusi rutin untuk memahami berbagai isu yang berkembang.

Dukungan kerja organisasi berupa alat kerja dan support kesekretariatan juga dibutuhkan baik oleh cabang, wilayah maupun di tingkat nasional.

Kedua wilayah area kerja harus terus melakukan pengorganisasian dan advokasi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dalam kedua hal tersebut juga harus dilakukan. Pelatihan menjadi salah satu cara namun dapat juga melalui belajar antar daerah sehingga dapat melihat langsung bagaimana praktek-praktek yang baik dan berhasil.

5. Penutup

Program untuk memperkuat peran dan posisi perempuan dalam mewujudkan keadilan gender, demokrasi dan perdamaian ini menjadi salah satu upaya Koalisi Perempuan Indonesia mencapai keadilan dan demokrasi yang sesungguhnya. Program ini menjadi salah satu bagian penting bagi kerja-kerja organisasi selama ini baik di NTB, NTT maupun di tingkat nasional sendiri.

Koalisi Perempuan Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota, pengurus dan staff di NTB, NTT dan tingkat nasional, kepada seluruh kepala desa, pemerintah daerah, SKPD, caleg perempuan, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, media massa dan lembaga jaringan yang telah mendukung pencapaian organisasi kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Oxfam Indonesia yang telah dan terus memberikan dukungan kepada Koalisi Perempuan Indonesia.